

FORWAS

Mengembangkan dan Memasyarakatkan Pengawasan

CINTA SEPENUH HATI UNTUK ANAK-ANAK TERBUANG



0856-4209

Edisi ke 4 / 2018



Situs "Gunung Padang"
Dilema Pemajuan Kebudayaan
di Sela Kontroversi Penelitian



"Dopari Sakatu"
Cara Guru
Berkomunikasi Inovatif



KONGRES KEBUDAYAAN
INDONESIA 2018
Berkebhudayaan dalam Kebudayaan



Atraksi Budaya dalam rangka
Kongres Kebudayaan

CERITA SAMPUL



Endang Yuli Purwati
pengumpul anak-anak
terbuang

EDITORIAL

4 | Menakar Dedikasi

LAPORAN UTAMA

5 | Situs "Gunung Padang"
Dilema Pemajuan Kebudayaan
di Sela Kontroversi Penelitian



14 | Mengintip Istana Lima Laras:
Situs Budaya Yang Hancur
Dimakan Usia

LAPORAN PELIPUTAN

20 | Cinta Sepenuh Hati untuk Anak-
anak Terbuang

32 | "Dopari Sakatu" Cara Guru
Berkomunikasi Inovatif

KISAH INSPIRATIF

26 | Biarlah Namaku Cubak

ARTIKEL

34 | Mencegah Fraud dengan
Membelanjakan Dana
Pendidikan secara Nontunai
(Cashless)

37 | Program Magang di Luar Negeri
bagi PNS Baru

39 | Perlunya Standar Biaya Khusus
(SBK) Kebudayaan

43 | Peran Auditor Menghalau
Tindak Kejahatan Korupsi

46 | Internal Auditor Menjawab
Tantangan Revolusi Industri 4.0

50 | Inspirasi Perubahan Melalui
SPAK

52 | Peran Etik Menjaga dan
Mengawasi Perilaku Pejabat
Publik

HALAMAN TERAKHIR

62 | Teori Diferensiasi Ala Pak Kadir

Menakar Dedikasi

Penghujung tahun selalu berulang, sebuah siklus yang dimaknai berbeda-beda. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam mendedikasikan diri terhadap bangsa dan negara, ada yang biasa-biasa saja dan ada pula yang mencatatkan prestasi luar biasa. Itulah cermin kita, cermin yang ditakar oleh setiap individu sebagai seorang ASN.

Jika kita tidak ingin tergesa-gesa melewati penghujung tahun kali ini, ada baiknya membuat neraca pribadi tentang loyalitas dan dedikasi kepada bangsa dan negara, atau setidaknya kepada institusi kita. Biarlah kita larut dalam kejujuran diri kita sendiri tentang apa yang sudah kita sumbangkan bagi kepentingan bangsa dan negara dan tentu saja kepentingan rakyat yang sejatinya adalah tuan di negeri ini.

Sebagai ilustrasi, dalam penerbitan ini kami suguhkan pengalaman luar biasa dari seorang guru biasa yang karena ketulusannya, menjadi sosok berbeda dibanding ASN lain dalam mendedikasikan dirinya untuk masyarakat luas. Sang guru memancing ketertarikan pemerintah untuk mengundangnya masuk dalam kancah kompetisi ASN Inspiratif 2018 di tengah puluhan ribu ASN yang sama-sama berjuang mendapat anugerah kehormatan itu.

Sang guru tersebut sederhana, tetapi memiliki ketulusan di atas rata-rata. Mampu berbuat luar biasa di tengah pemenuhan kewajibannya sebagai pendidik di antara siswa-siswinya, ibu

rumah tangga di antara anak kandung dan puluhan anak-anak yang terbuang dari orang tua mereka, serta seorang sosok penopang kehidupan bagi rumah tangga keluarganya. Untuk memperkuat kisah inspiratif itu, kami sertakan sebuah cerita pendek tentang kisah anak terbuang dari orang tuanya. Sebuah kisah nyata yang ditulis dengan maksud menggugah rasa kemanusiaan kita.

Dalam penulisan lain, kami singkap tentang kontroversi penelitian terhadap situs budaya Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat yang sejak ditemukan abad lalu selalu saja mengemuka baik dari perspektif politis, penelitian, maupun aroma mistis. Kesimpulannya belum final, tetapi sedikitnya telah membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar yang mulai mengecap keuntungan dari pasang-surutnya perdebatan ilmiah itu.

Akhirnya segenap kru Majalah *FORWAS* menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kritik dan saran terhadap perkembangan majalah Itjen Kemendikbud ini. Kami memang bukan media terbaik, tetapi sepanjang waktu kami selalu berusaha memperbaiki ketidaksempurnaan itu. Selamat menyongsong tahun baru 2019, semoga dedikasi kita lebih baik dibanding sebelumnya.

Salam dari redaksi

Situs "Gunung Padang"

Dilema Pemajuan Kebudayaan di Sela Kontroversi Penelitian

Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan Megalitikum yang terdapat di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sebuah bukit punden berundak pada ketinggian 885 meter dari permukaan air laut dengan luas hamparan sekitar 900 m² yang terdiri dari tumpukan jutaan balok batu bersegi lima. Fakta ini hampir semua peneliti sepakat, kecuali soal kesimpulan tentang asal muasal dan tafsir yang menyertainya.



Gunung Padang. (Istimewa)

Sejak pertama kali dipublikasikan dalam *Rapporten van de Oudheidkundige Dienst* (Buletin Dinas Kepurbakalaan) tahun 1914 sebagai tindak lanjut dari hasil temuan sekitar tahun 1800-an, keberadaan situs Gunung Padang selalu menjadi objek perdebatan di kalangan ilmuwan dan peneliti kepurbakalaan. Bahkan, dalam catatan Juru Pelihara (Jupel) selalu terjadi pasang surut perhatian publik termasuk pemerintah dalam upaya menyingkap misteri situs itu.

Barangkali silang pendapat di antara para peneliti bermula sekitar tahun 1980-an ketika Lutfi Yondri, seorang peneliti utama dari Balai Arkeologi Bandung, menerangkan bahwa Gunung Padang mulai muncul lagi dalam ranah penelitian arkeologi sejak tahun 1979 setelah ditemukan kembali oleh sejumlah warga.

Sejak ditemukan kembali pada tahun 1979, berturut-turut telah dilakukan penelitian terhadap

Gunung Padang oleh tim dari Direktori Purbakala, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Bandung, Pemerintah Daerah, dan berbagai kelompok masyarakat yang mencoba menggali nilai-nilai lain yang terkandung dalam tinggalan tersebut.

Sekitar tahun 2011, terjadi kesimpulan awal yang terkesan kontroversial tentang Gunung Padang yang sempat ramai diisukan sebagai sebuah piramida dan berumur lebih tua dari Piramida Giza di Mesir dan kebudayaan Machu Picchu di Peru. Dugaan Piramida juga pernah terjadi pada Gunung Lalakon di Kabupaten Bandung Barat dan Gunung Sadahurip di Garut.

Danny Hilman Natawidjaja, ketua tim peneliti Katasropik Purba—berganti nama menjadi Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM), pada Maret 2012 menyampaikan bahwa dugaan itu diperoleh setelah melakukan pertanggalan dari uji karbon terhadap hasil pengeboran di Gunung Padang.



“Kalau dari *carbon dating* itu betul, iya (lebih tua dari Mesir dan Machu Picchu). Kan ada 2 umur, 1 *dating* dari karbon persis di bawah situs di kedalaman sekitar 4 meteran, itu *dating* 4.700-an [tahun SM]. Kemudian *dating* dari kedalaman 8 meter, itu yang keluaranya 10 ribuan itu. Kalau masalah tua-tuaan, ya *dating* yang pertama saja sudah lebih tua dari Giza, yang sekitar 2.800 SM, dan Machu Picchu sekitar 1.000-an Masehi,” ujarnya.

Sejarawan Belanda, N. J. Krom juga telah menyinggunginya pada tahun 1949. Setelah sempat “terlupakan”, pada tahun 1979 tiga penduduk setempat, Endi, Soma, dan Abidin, melaporkan kepada Edi, Penilik Kebudayaan Kecamatan Campaka, mengenai keberadaan tumpukan batu-batu persegi besar dengan berbagai ukuran yang tersusun dalam suatu tempat berundak yang mengarah ke Gunung Gede. Selanjutnya, bersama-sama dengan Kepala Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan Kebudayaan



Tim penelitian sedang melakukan kegiatan di Gunung Padang (istimewa)

Kabupaten Cianjur, R. Adang Suwanda, ia mengadakan pengecekan. Tindak lanjutnya adalah kajian arkeologi, sejarah, dan geologi yang dilakukan Puslit Arkenas pada tahun 1979 terhadap situs ini.

Lokasi situs berbukit-bukit curam dan sulit dijangkau. Kompleksnya memanjang, menutupi permukaan sebuah bukit yang dibatasi oleh jejeran batu andesit besar berbentuk persegi. Situs itu dikelilingi oleh lembah-lembah yang sangat dalam. Tempat ini sebelumnya memang telah dikeramatkan oleh warga setempat. Penduduk menganggapnya sebagai tempat Prabu Siliwangi, Raja Sunda, berusaha membangun istana dalam semalam.

Fungsi situs Gunung Padang diperkirakan adalah tempat pemujaan bagi masyarakat yang bermukim di sana pada sekitar 2000 tahun SM. Hasil penelitian Rolan Mauludy dan Hokky Situngkir menunjukkan kemungkinan adanya pelibatan musik dari beberapa batu megalit yang ada. Selain Gunung Padang, terdapat beberapa tapak lain di Cianjur yang merupakan peninggalan periode megalitikum/zaman batu

Pernyataan Danny Hilman tentang hasil penelitian timnya dipermaklumkan belum selesai karena baru melakukan pengeboran di dua titik. Menurutnya, masih ada beberapa titik dibutuhkan untuk mengambil sampel. "Penelitian masih belum selesai, Nggak cuma dua titik dari beberapa kedalaman, tapi butuh lebih dari 10 sampel. Kalau positif dalam ilmiah, cek dan ricek melihat hasil penelitian dulu. Belum akhir, penelitian terus berlangsung, ada beberapa titik lagi," tambahnya.

Gunung Padang yang diduga piramida dan berusia lebih tua dari dua peradaban tua di dunia tersebut, sempat menjadi perbincangan di masyarakat. Namun, perlahan isu ini kemudian mereda, meski simpang siur informasi masih terjadi hampir bersamaan dengan makin kuatnya kesimpulan yang menyatakan Gunung Padang bukan piramida dan usianya tidak setua yang dianggap oleh sebagian masyarakat.

Mula-mula ia menjelaskan bahwa anggapan piramida itu awalnya bukan di Gunung Padang, tapi Gunung Lalakon di Kabupaten Bandung Barat, dan Gunung Sadahurip di Garut. Namun, ia kaget karena tiba-tiba pada tahun 2011 isu piramida itu beralih ke Gunung Padang. Hasil uji karbon yang menjadi dasar pertanggalan, menurut Lutfi, meski sampel yang dibawa ke laboratorium itu tidak ada yang pernah salah, tapi harus jelas apakah sampel yang dibawa ke itu benda budaya atau bukan.

"Oleh karena mereka berpikir bahwa di dalam Gunung Padang ada piramida segala macam, seolah-olah umur itu mereka jadikan sebagai umur budaya. Nah, itu yang berbeda dengan sisi arkeologis dari pertanggalan, itu pertama ya," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa temuan di Gunung Padang hanya beberapa fragmen gerabah atau tembikar. Fragmen tembikar adalah bukti bahwa tidak ada permukiman yang besar. Hal ini tentu bertentangan dengan dugaan piramida, karena untuk membangun sebuah piramida membutuhkan tenaga manusia yang banyak.



Loket pembelian tiket masuk (istimewa)



Punden berundak-undak dilihat dari atas gardu pandang (istimewa)



Tangga menuju puncak Gunung Padang (istimewa)



“Kalau di arkeologi, apalagi di arkeologi prasejarah, sering kali kita menemukan jejak budayanya, tinggalan-tinggalan budayanya. Nah, oleh karena dari tinggalan itu tidak ada benda-benda yang menunjukkan umur budaya secara langsung, barulah kita lakukan proses pertanggalan lewat laboratorium. Dan saya lihat kembali hasil pertanggalan mereka itu, dan itu terbolak-balik. Itu yang saya bantah,” tambahnya.

Hasil-hasil pertanggalan yang dicuplik dari hasil bor di Gunung Padang terbolak-balik. Ia mencontohkan, di kedalaman 7 setengah meter umurnya 23.000 tahun SM. Tetapi di kedalaman 8 meter umurnya jadi 11.000. Menurutnya, mestinya semakin dalam maka semakin tua umurnya.

Selain itu, hasil pertanggalan karbon dari laboratorium, menurutnya, dalam arkeologi tidak bisa digunakan langsung, tapi harus dikalibrasi, disesuaikan dengan temuan dari lapisan tanah. Pertama adalah kalibrasi yang dilakukan oleh para kimiawan, yang nantinya akan dilakukan simpangan penanggalannya: umur tumbuhan, umur menengah, dan umur muda. Ketiga umur inilah yang dicocokkan dengan temuan arkeologi yang didapatkan di lapisan tanah yang gali. “Kalau misalnya dari laboratorium itu mendapatkan umur 10.000, sementara temuannya sekitar 3.000 atau 4.000, artinya simpangan umur tua itu yang kita pakai. Contoh kasus terjadi seperti kesalahan di Gunung Padang. Pada saat mereka melakukan pertanggalan di kedalaman 50-55 atau satu meter, dia katakan umurnya 2500 tahun SM, sementara temuannya itu fragmen keramik dari tahun 17, kan enggak cocok,” ujarnya.

Hal lain yang dibantah oleh Lutfi adalah soal temuan koin purba yang awalnya diduga berasal dari tahun 5200 SM. Namun setelah ia lihat, koin itu memiliki huruf Jawa di sekelilingnya, dan terdapat juga huruf Arab, yang artinya usianya tidak setua dugaan tersebut. “Mungkinkah koin itu berasal dari 5200 tahun SM? Mesir Kuno saja yang baru kenal huruf yang sederhana yang paling tua di dunia itu 3000 tahun SM,” katanya.

Masih soal koin tersebut yang dikatakan oleh TTRM berasal dari kedalaman 11 meter, Lutfi menjelaskan bahwa koin tersebut ada lapisan platinanya serta lapisan karat. Menurutnya, karat terbentuk karena proses sentuhan air atau kelembaban. “Tidak mungkin koin itu berasal dari kedalaman 11 meter, pasti koin itu paling jauh hanya di balik rumput. Kalau dia 11 meter kan di Gunung Padang itu lembab, pasti korosi dia, paling tidak ga usah 11 meter, 35 senti aja di bawah permukaan tanah, itu akan tertutup karat semuanya karena Gunung Padang lembab daerahnya,” ujar Lutfi.

Lutfi menginformasikan bahwa semua bantahannya tersebut disampaikan kepada pihak-pihak lain yang melakukan penelitian di Gunung Padang karena mereka sudah membuat simpulan-simpulan awal sebelum proses kerjanya betul-betul selesai. “Hanya mereka sudah bikin simpulan-simpulan di awal ada ini ada ini, mereka mencoba mencari bendanya, temuannya, atau mereka di awal membuat simpulan-simpulan itu, data itu yang tidak klop sama sekali,” imbuhnya.

Sampai isu piramida dan dugaan bahwa Gunung Padang umurnya lebih tua dari sejumlah kebudayaan dunia lainnya mereda, apa yang disampaikan Lutfi tidak dibantah oleh peneliti Gunung Padang yang lain.

“Buku sudah saya luncurkan, tidak ada bantahan. Sudah beberapa kali bedah buku itu (Gunung Padang: Kebudayaan, Manusia, dan Lingkungan (2017), enggak ada bantahan atau komentar, sampai sekarang tidak ada,” pungkasnya.

Kemudian isu situs Gunung Padang mencuat lagi, ketika sekelompok orang mengusulkan adanya kegiatan penelitian kembali. Namun, di pihak lain, ada pula sekelompok orang meminta Presiden Jokowi tegas untuk tidak mengucurkan dana bagi penelitian situs megalitikum Gunung Padang. Situs itu pernah dihebohkan sebagai piramida raksasa. Melihat lokasi situs megalitikum

Gunung Padang (Gunung Panghegar), banyak pihak lantas melakukan upaya untuk meneliti. Bahkan, di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sempat terkecoh dan ditunggu untuk memberikan perintahnya atas penelitian oleh Tim Peneliti yang memberikan laporan kepada presiden. Apa sebenarnya yang ada di Gunung Padang (Panghegar) di Cianjur itu?

Kalangan obsesional bergabung dengan para peneliti, para pihak Pemda, dan oportunis untuk melakukan penelitian. Lantas apa yang terjadi? Apakah benar di perut bumi di bawah situs megalitikum Gunung Padang ini ada ruangan kosong atau bahkan alat elektronik kuno - terkait dengan Atlantis dan bahkan peradaban angkasa luar? Sebenarnya, ini bisa dibuktikan secara ilmiah dari yang tampak sampai susunan batuan geologinya.

Keindahan situs megalitikum Gunung Padang (Panghegar) terletak pada kebesarannya. Bangunan situs itu berada di atas bukit yang oleh masyarakat disebut Gunung Padang yang bernama asli Gunung Panghegar. Situs Gunung Panghegar ini memiliki lima pelataran dengan konsep punden berundak-undak. Pelataran paling dekat dengan tangga di sisi utara dibatasi oleh tatanan batu yang rata.

Pelataran di bagian menuju Pelataran Kesatu sesungguhnya merupakan tempat untuk persiapan masuk ke dalam situs pemujaan. Pelataran ini sebenarnya rata. Hal ini ditunjukkan oleh pergeseran bebatuan yang berserak secara teratur dan berpola. Ini menunjukkan bahwa pergeseran tanah di lokasi situs pemujaan prasejarah itu merupakan penyebab alami berseraknya situs megalitikum paling spektakuler di Indonesia ini.

Pelataran di luar batas terdiri dari tatanan bebatuan yang telah bergeser. Pelataran ini berukuran sekitar 6 X 30 meter (pada masa lalu ukurannya lebih kecil kemudian melebar akibat pergeseran tanah ratusan ribu tahun). Sebelum memasuki Pelataran Kesatu, terdapat bebatuan yang membatasi area di luar situs pemujaan dan situs pemujaan. Batuan itu memanjang dari timur ke barat.

Pelataran Kesatu yang lebih tinggi dari area di depannya ditandai dengan pelataran yang memiliki luas sekitar 30 X 30 meter. Di Pelataran Kesatu ini, terdapat bentukan semacam ‘ruangan’ yang dibatasi batu. Di sisi sebelah kiri pintu masuk



Jupel (Juru Pelihara) situs Gunung Padang Cianjur (ISTIMEWA)

dari utara, terdapat ruangan dengan tatanan batu yang relatif masih tegak dengan sedikit pergeseran. Ruangan ini memiliki 'pintu masuk' yang masih jelas. Berseberangan dengan ruangan ini, dibatasi dengan jalanan koridor sebagai kelanjutan dari jalan asli dari bawah Gunung Padang lurus ke Pelataran Kedua, terdapat tiga ruangan dengan ukuran setengah dari ukuran luas ruang di sebelah kiri.

Di tengah Pelataran Kesatu ini ada tumpukan batu. Jika diamati dengan garis simetris sisa batu-batuan yang terserak secara teratur, tumpukan batu itu merupakan 'pintu masuk' yang harus dilalui sebelum melangkah ke Pelataran Kedua. Palataran Kesatu dan Pelataran Kedua dibatasi oleh tumpukan batu setinggi 6 meter menuju Pelataran Kedua yang lebih tinggi. Jalan atau koridor menuju Pelataran Kedua yang berundak masih tampak tersisa.

Mamasuki Pelataran Kedua, akan tampak 'ruangan atau area pemujaan' yang ukurannya lebarnya sama dengan Pelataran Kesatu - dengan dasar teori situs ini dibangun secara simetris. Namun, area Pelataran Kedua ini hanya dibagi menjadi dua area pemujaan. Yang paling menonjol dari area Pelataran Kedua ini adalah adanya beberapa batu besar yang diduga sebagai tempat duduk para tetua atau penjaga mengingat posisinya simetris dan terdapat di Pelataran Kedua, Pelataran Ketiga, dan Pelataran Keempat.

Pelataran Ketiga dan Pelataran Keempat terdiri dari area pemujaan yang luas. Hanya terbagi menjadi 'ruangan' di sisi kiri arah masuk ke Pelataran Kelima. Ruangan kosong ini diyakini menjadi tempat untuk para pemuja yang hadir dalam pemujaan untuk menunggu. Sementara Pelataran Kelima terdiri dari area pemujaan di tengah dengan 'ruangan' di sisi sebelah kanan tempat pusat pemujaan.

Lalu, bagaimana dengan peradaban angkasa



Tonggak batu bersegi lima yang posisinya menghadap kiblat (emte)

luar dan Atlantis yang menyebut Gunung Padang sebagai pusat sentrifugal energi peradaban Atlantis? Gunung Padang (Panghegar) yang terletak di tengah perbukitan—dengan latar depan Gunung Pangrango—jelas menjadi sumber energi mistis spiritual. Oleh karena itu, diyakini pemujaan dipimpin oleh tetua/pandita prasejarah menghadap ke utara. Dengan demikian, para pemuja menghadap ke utara, sementara tetua memimpin dari arah tertinggi di bagian selatan. Ini sungguh unik.

Benarkah di bawah situs pemujaan prasejarah Gunung Padang atau Panghegar terdapat alat canggih elektronik dan ruangan kosong? Beberapa waktu yang lalu, satu tim beranggotakan para pejabat, teman pejabat, teman ahli, melakukan penelitian. Namun, penelitian itu

didasari oleh hipotesis-obesef. Hipotesis bahwa di bawah situs pemujaan Gunung Padang terdapat alat canggih. Lalu, mereka melakukan pemboran di lokasi samping Pelataran Kelima sedalam 14 meter. Hasilnya? Lubang itu diisi air dan tak bisa penuh. Lalu disimpulkan bahwa di bawah situs Gunung Padang terdapat ruangan kosong. Benarkah? Tidak.

Yang benar adalah struktur tanah di bawah Gunung Padang terdiri bebatuan sehingga terdapat rongga di antara bebatuan. Akibatnya, jika ada air di permukaan Gunung Padang, air tersebut akan terserap cepat. Air tidak pernah menggenang di situs pemujaan Gunung Padang. Hal ini dibuktikan dengan posisi bebatuan yang mengalami pergeseran tak melebihi ukuran 5 meter dalam kurun waktu ratusan ribu tahun. Daya



Sumur Kahuripan yang tidak pernah kering dan kepada pengunjung disarankan untuk mencuci muka sebelum mendaki bukit. (emte)

serap air Gunung Padang membantu stabilisasi tanah di Gunung Padang.

Jadi, klaim para peneliti yang menyebutkan di bawah situs megalitikum Gunung Padang terdapat ruangan, alat canggih, sumber energi sentrifugal, peradaban canggih Atlantis, adalah omong kosong belaka. Para peneliti itu hanya melakukan upaya

sensasi untuk Presiden SBY yang suka hal aneh dengan pemborosan biaya. Hasilnya? Omong kosong. Yang menyebutkan Gunung Padang sebagai pusat Atlantis, atau tanda peradaban mitologi Eropa Atlantis, tidaklah benar, kalau tak disebutkan sebagai penipuan.

Para ahli yang terlibat yang meneliti Gunung Padang belakangan ini, bahkan sampai melakukan peledakan menggunakan dinamit di lereng sungai Gunung Padang—dengan maksud mendapatkan struktur bangunan atau struktur buatan manusia di bawah Gunung Padang—lebih menunjukkan kengawuran dan ketidakwarasan dibandingkan penelitian arkeologi ilmiah yang dilakukan. Perusakan situs akan lebih parah lagi jika obsesi para peneliti yang tak tahu diri itu dibiarkan menggorok tanah dan bumi di bawah Gunung Padang sebagai situs peradaban pemujaan prasejarah. Jadi, yang benar, Gunung Padang adalah pusat energi spiritual yang dikunjungi oleh para penguasa dari zaman prasejarah, Raja Siliwangi, Pu'un, dukun, spiritualis, yang menuju karuhun dan ingin mendapatkan energi positif dari posisi Gunung Padang yang memang ada di pusat wilayah yang dikelilingi gunung dan perbukitan. Dengan posisi seperti itu, pada saat bulan purnama (*full moon*), pengunjung yang duduk di Pelataran Kelima menghadap utara Gunung Pangrango, energi positif sentrifugal-spiritual—bukan peradaban Atlantis—akan didapatkan. Energi spiritual-mistik Gunung Padang (Panghegar) memang sangat kuat pada saat bulan purnama dan bulan mati. Gunung Padang adalah tempat paling hebat untuk mendapatkan energi positif bagi jiwa manusia.

Untuk itu, disarankan Presiden Jokowi harus secara rasional mengkaji lagi mengenai pengucuran dana bagi penelitian situs Gunung Padang. Bila perlu, presiden menghentikan setiap pencairan dana APBN bagi penelitian tak masuk akal bahwa di bawah perut Gunung Padang terdapat *man-made structures* alias bangunan buatan manusia. Itulah hasil penelitian independen Ki Sabdopanditoratu untuk meluruskan berita dan analisis *ngawur* mengenai Gunung Padang.

Presiden Jokowi harus tegas untuk tidak mengucurkan dana bagi penelitian situs megalitikum Gunung Padang. Mengapa permintaan untuk dilakukan penelitian lanjutan,

barangkali tidak terlepas dari keyakinan para peneliti sebelumnya kepada presiden SBY waktu itu. Bahkan, sempat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh, memastikan penelitian Situs Gunung Padang di Desa Karyamukti Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus berlanjut. Kepastian itu disampaikan saat mengunjungi situs yang digadang-gadang terbesar di Asia Tenggara itu pada hari Rabu 17 September 2014 yang secara simbolis memastikan alokasi anggaran sebesar Rp 24 triliun sudah disiapkan.

“Dari hasil pembuktian sementara, ada tanda-tanda bahwa di sini (Gunung Padang), ada kehidupan Sebelum Masehi. Jika memang terbukti ada peradaban tua, tentunya kita patut berbangga,” kata M. Nuh kepada wartawan di Cianjur waktu itu. Mengutip keterangan Tim Nasional (Timnas) Penelitian Gunung Padang, kehidupan itu diperkirakan berusia 3.000 tahun SM atau kehidupan di saat zaman Nabi Ibrahim. Artinya, pada zaman itu, di Indonesia sudah ada kehidupan. “Harus, kita harus bangga dengan ini sebagai bangsa Indonesia,” ujar Nuh.

Mengutip keterangan Tim Nasional (Timnas) Penelitian Gunung Padang, kehidupan itu diperkirakan berusia 3.000 tahun SM atau kehidupan di saat zaman Nabi Ibrahim. Artinya, pada zaman itu, di Indonesia sudah ada kehidupan. “Harus, kita harus bangga dengan ini sebagai bangsa Indonesia,” ujar Nuh.

Jika belakangan ini isu penelitian penuh dengan kontroversi, Nuh sejak jauh hari menegaskan kembali agar penelitian saat ini tak perlu ada kontroversi. Dalihnya, fase penelitian itu selalu mendorong adanya dugaan-dugaan untuk membuktikan rasa penasaran. Jika penelitian itu terbukti, penelitian akan berlanjut ke fase selanjutnya. Jika benar-benar valid hasil penelitian, pemerintah rencananya akan melakukan tiga fase dalam mengungkap sejarah peradaban kehidupan, yakni fase penelitian, fase konservasi, dan fase promosi. Pada fase penelitian yang paling menonjol adalah akademik hipotesis sehingga tidak perlu masuk ke dalam wilayah kontroversi.

Terlepas dari kontroversi penelitian tentang misteri Gunung Padang, kini lokasi berhawa sejuk itu mulai berbenah menyambut kehadiran wisatawan yang datang dari berbagai penjuru



Juru Pelihara, Nanang (tengah) sesaat menjelaskan misteri Gunung Padang kepada pengunjung. (emte)

dunia. Lokasi situs ini memiliki daya tarik tersendiri dibanding situs-situs purbakala lainnya karena setidaknya mampu memancing kehadiran tiga Presiden Republik Indonesia, yaitu Sukarno, Soeharto, dan Megawati Soekarnoputeri.

Akses menuju Situs Megalitikum Gunung Padang sudah semakin bagus. Jalan raya menuju objek wisata tersebut sudah dibangun lebar dan dua arah. Dengan keadaan jalan yang seperti itu, kendaraan bis wisata sudah leluasa mencapai pelataran utama lokasi petilasan Prabu Siliwangi itu. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menata kawasan itu sehingga kelak menjadi destinasi wisata kelas internasional. Dalam suatu kesempatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan akan memasukkan situs megalitikum Gunung Padang dalam destinasi wisata yang akan dibenahi besar-besaran mulai 2019. Rencananya, ada dua tipe pekerjaan untuk destinasi wisata yang akan dibenahi. Tipe satu, perbaikan hanya sebatas akses. Sementara tipe dua, akan melakukan perbaikan menyeluruh termasuk untuk membuat destinasi yang terbengkalai dan tidak tertata professional akan menjadi lebih tertata, terawat, dan terjaga dengan baik. (Emte)



Istana Lima Laras di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. (Foto:Risanto)

Mengintip Istana Lima Laras : Situs Budaya Yang Hancur Dimakan Usia

Tidak ada lagi suara tetabuhan dan bunyi gong bertalu-talu. Tidak ada lagi para hulubalang menyandang tombak dan pedang maha sakti. Tidak ada lagi rakyat jelata berkerumun di depan anjungan bangunan istana untuk menunggu titah Sang Baginda Raja. Dan, tidak ada lagi gemerlap lampu kemewahan yang dahulu kaum bangsawan bercengkerama. Kini yang ada hanyalah suasana sunyi, dingin, angker bersama sisa-sisa bangunan istana yang terbiar hancur dimakan usia. Itulah Istana Lima Laras yang pernah jaya raya turut mengantar kemerdekaan Republik Indonesia.



Bangunan istana tua peninggalan abad ke-16 itu terletak di kecamatan Tanjung Tiram. Sebuah kawasan bibir pantai di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara. Bangunan yang masih menyisakan kemegahan itu, hampir sebagian besar dinding, lantai, atap, dan ornamen khas kerajaan-kerajaan Melayu Tua sudah hancur dimakan rayap. Bahkan, segala perabot rumah tangga istana juga hancur kecuali sebuah kursi tua dan dua buah meriam kuno yang masih terawat baik.

Proses kehancuran situs budaya itu terasa semakin cepat setelah beberapa tahun terakhir tidak pernah lagi dijamah oleh kegiatan pemeliharaan dan renovasi memadai oleh pemangku

kepentingan kebudayaan daerah setempat, kecuali pemberian honor tenaga kebersihan Rp 1 juta per bulan. "Kami tidak dapat berbuat banyak menyelamatkan sisa peninggalan sejarah ini karena hampir seluruh ahli waris tersita mempertahankan hidup sehari-hari," ungkap Datuk Azminsyah, ahli waris kerajaan turunan ke-13 berterus terang ketika menerima kru *Majalah FORWAS* di pelataran istana Lima Laras.

Cikal bakal dari kerajaan Lima Laras tidak terlepas dari Kesultanan Siak Sri Indapura di Riau, sebuah kerajaan tua yang diperkirakan sudah berdiri sejak abad ke 16, sering berpindah-pindah dan belum memiliki istana permanen. Pada tahun 1912, Datuk Matyoeda (Mohammad Yoeda),



Serambi Istana Lima Laras di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. (Foto:Risanto)

Raja Kerajaan Lima Laras XII berniat untuk membangun istana di jazirah Batu Bara yang dikenal sebagai daerah strategis untuk perdagangan lantaran berdekatan dengan Tanjung Balai yang saat itu masih dikuasai kerajaan Batu Bara.

Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu melarang para raja untuk berdagang dan larangan itu tidak pernah dijelaskan, tetapi asumsi sementara terkait dengan strategi perdagangan monopoli oleh VOC. Datuk Matyoeda sendiri sering berdagang ke Malaysia khususnya daerah semenanjung Melaka (Malaysia), Singapura, dan Thailand.

Saat larangan tersebut diberlakukan, beberapa armada kapal dagang milik warga kerajaan beserta isinya disita oleh Belanda setibanya kembali di Asahan. Namun, Datuk Matyoeda memproklamasikan bahwa jika dagangan terakhirnya selamat, hasilnya akan digunakan membangun istana. Rupanya, kapalnya kembali dengan selamat, janji tersebut pun dipenuhi kemudian Sang Raja membangun istana Lima Laras.

Datuk Matyoeda sendiri hanya sebentar saja dapat menikmati istana tersebut, Ia bersama keluarga dan unsur pemerintahannya mendiami istana sejak tahun 1917 dan wafat pada tahun 1919 sekaligus penanda berakhirnya masa kejayaan Kerajaan Lima Laras. Keluarga Kerajaan Lima Laras pun harus terusir dari Istana pada tahun 1942 saat tentara Jepang menundukkan daerah Asahan. Dan pada saat itu

Tangga putar di Istana Lima Laras yang sudah lapuk dimakan usia. (Foto:Risanto)



pula, para pewaris kerajaan yaitu cucu dari Datuk Matyoeda terpaksa harus keluar dari Istana.

Istana Lima Laras memiliki empat anjungan yang menghadap ke empat arah mata angin. Dua buah meriam berada di depan bangunannya. Arsitektur Melayu sangat kental, terutama pada atap dan kisi-kisi rumah panggung tersebut. Lantai bawah dan balairungnya terbuat dari beton, sementara lantai dua tempat keluarga istana tinggal, hanya berlantaikan kayu. Ada sesuatu yang legendaris ketika berada di lantai dua dan tiga, di situ terdapat beberapa kamar khusus untuk peristirahatan sang baginda raja beserta keempat isterinya.



Datuk Azmansyah sebagai ahli waris Kerajaan Lima Laras ketika diwawancarai Forwas di teras Istana Lima Laras. (Foto:Risanto)

Jangan membandingkan Istana Lima Laras dengan Istana Maimun di kota Medan yang megah dan penuh dengan barang-barang antik dan mahal. Istana Lima Laras sendiri kondisinya sangat tidak terawat. Bangunan bercat kayu dengan dominasi warna hijau sudah diambang kehancuran. Kayu bangunan di sana sini sudah lapuk dimakan usia, sementara anak tangga berputar yang dahulu masyhur bernuansa Eropa sudah tidak dapat dipakai lagi, sementara di sisi gedung istana sudah

ditumbuhi semak-semak setinggi orang dewasa.

Istana yang berada di atas tanah seluas 102 x 98 meter ini menurut riwayat dibangun dengan biaya 150.000 gulden yang dipimpin langsung baginda raja dengan mendatangkan 80 orang tenaga ahli dari China dan Pulau Penang, Malaysia, serta sejumlah tukang dari sekitar lokasi pembangunan istana. Istana yang menghadap selatan itu pada bagian depan masih terpampang dua buah meriam kuno yang dibiarkan tergeletak begitu saja.

Hampir keseluruhan bangunan berarsitektur Melayu, terutama pada model atap dan kisi-kisinya sementara di beberapa bagian istana terdapat ornamen Cina, kecuali

batu bata dan bahan bangunan seperti kaca untuk jendela dan pintu yang didatangkan dari luar negeri.

Lantai pertama terbuat dari beton dan dilengkapi balairung atau tempat bermusyawarah. Di lantai dua dan tiga terdapat kamar-kamar dengan ukuran sekitar 6 x 5 meter. Secara total, istana ini memiliki 28

pintu dan 66 pasang jendela. Untuk naik ke tingkat dua dan tiga, selain tangga biasa di bagian luar, ada tangga berputar dengan 27 anak tangga di bagian dalam.

Jika berkunjung ke istana itu sekarang ini, jangan bayangkan masih bisa melihat tangga putar itu masih utuh. Beberapa anak tangga sudah hilang dan bagian tengah telah putus karena lapuk. Jangan berharap juga bisa melihat bekas singgasana atau peralatan tanda kemegahan kerajaan itu pada masa lampau, sebab sebagian besar perlengkapan



Dapur Istana Lima Laras yang sudah lapuk dan tidak berfungsi lagi. (Foto:Risanto)

istana sudah hancur atau raib. Menurut penuturan Datuk Muhammad Azminsyah yang mengaku salah seorang cucu Datuk Matyoeda, dirinya beruntung masih menyimpan beberapa barang pusaka perlengkapan istana, seperti tempayan besar dengan ukiran naga, sejumlah barang pecah-belah, dua buah pedang, dan sebuah tombak. Barang itu disimpan di rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari istana.

Istana Lima Laras sebenarnya berada di sebuah perkampungan nelayan kecil atau sekitar 136 kilometer dari kota Medan. Akses kendaraan agak sulit karena jalan dan jembatan serba sempit dan belum layak menjadi sarana penunjang pariwisata. Menurut dokumentasi literasi yang tersisa, kerajaan ini pernah menjadi bagian dari Kerajaan Sultan Asahan dan pemerintahan datuk-datuk di wilayah Batu

Bara tetap diakui oleh Belanda, namun tidak berkuasa penuh sebagaimana sebelumnya.

Wilayah pemerintahan Kesultanan dibagi atas distrik dan onder distrik yaitu Distrik Tanjung Balai dan Onder Distrik Sungai Kepayang, Distrik Kisaran dan Distrik Bandar Pulau, dan Onder Distrik Bandar Pasir Mandoge. Sementara wilayah pemerintahan datuk-datuk di kerajaan Batu Bara dibagi menjadi wilayah *self bestuur*, yaitu *self bestuur* Indrapura, *self bestuur* Lima Puluh, *self bestuur* Pesisir, *self bestuur* Suku Dua (Bogak dan Lima Laras).

Kekuasaan pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang pada tanggal 13 Maret 1942. Kemudian, sejak saat itu pemerintahan fasisme Jepang sekaligus menggantikan pemerintahan Belanda. Pemerintahan fasisme Jepang dipimpin

oleh Letnan T. Jamada dengan struktur pemerintahan mengikuti struktur pemerintahan Belanda yaitu mewilayahi Asahan Bunsyu dan bawahannya, Fuku Bunsyu Batu bara.

Selain itu, wilayah yang lebih kecil di bagi menjadi distrik, yaitu Distrik Tanjung Balai, Kisaran, Bandar Pulau, Pulau Rakyat, dan Sei Kepayang. Pemerintahan fasisme Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 beberapa hari menjelang proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945 Komite Nasional Indonesia, wilayah Batu Bara yang tadinya dikendalikan Jepang dianggap sudah berakhir. Namun,

pemerintahan kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batu Bara masih tetap ada sebelum terbentuknya struktur pemerintahan Republik Indonesia di Asahan yang mencakup Kewedanan Tanjung Balai, Kewedanan Kisaran, Kewedanan Batubara Utara, Kewedanan Batubara Selatan, dan Kewedanan Bandar Pulau.

Nilai historis Istana Lima Laras lambat laun akan pudar bersamaan dengan rubuhnya bangunan situs budaya itu, bahkan tanpa diketahui alasan sebenarnya, objek wisata yang dahulu sempat menjadi buah bibir di antara raja-raja dan sultan di nusantara kini tidak lagi disebut-sebut dalam ajang promosi kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara. (emte)



Datuk Azmansyah menjelaskan sumur tua yang tidak pernah kering di dalam istana Lima Laras. (Foto:Risanto)



Keluarga Besar Ibu Endang Yuli Purwati bersama anak kandung dan anak asuh yang dibuang dari keluarga mereka (Istimewa)

Cinta Sepenuh Hati untuk Anak-Anak Terbuang

Tak hanya inovatif dalam cara mengajar, Endang Yuli Purwati juga sangat peduli kepada anak-anak terbuang dengan segala permasalahannya.

Banyak orang yang prihatin melihat anak-anak terlantar yang hidup dengan mengemis di jalan. Banyak pula yang hanya merasa kasihan ketika melihat atau membaca berita tentang bayi yang dibuang orang tuanya. Berbeda dengan Endang Yuli Purwati, guru agama Islam SMA Negeri 4 Bandung ini tergerak untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung itu dan merawat mereka bagaikan anak sendiri.

Terhitung sejak tahun 1984 sampai tahun 2004, wanita yang memiliki empat anak kandung ini sudah mengasuh dan menyekolahkan 54 anak terlantar, atau anak-anak dari keluarga tidak mampu. Dari jumlah itu, bahkan ada 8 anak yang sudah menjadi sarjana, dan satu di antaranya menjadi dokter.

Perhatian lebih Endang kepada anak keluarga tidak mampu berawal pada tahun 1984. Saat itu ia mempekerjakan seorang anak

perempuan lulusan SMP sebagai pengasuh anaknya. "Saya menilai kerjanya sangat bagus dan terlihat ada keinginan untuk melanjutkan sekolah ke SMA. Saya pun menolongnya dan membiayainya hingga lulus SMA," tutur Bu Yuli, sapaan akrabnya.

Ada perasaan senang saat ia bisa membantu mewujudkan keinginan pengasuh anak itu hingga bisa lulus SMA. Berangkat dari situ, kesenangannya untuk menolong dan menyekolahkan anak-anak tidak mampu seakan menjadi kebiasaan. Ia pun mulai berbuat hal yang sama kepada anak-anak tetangga yang tidak mampu, termasuk loper koran yang ingin bersekolah.

Mengasuh Puluhan Bayi

Di tengah kesibukannya mengurus anak-anak asuh pada tahun 2001, Yuli hamil anak keempat. Karena pernah mengalami sakit dan

sempat koma saat proses kelahiran anak ketiga, dokter menyarankannya untuk melakukan aborsi. Kontan Yuli menolak saran itu dan tetap mempertahankan bayinya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa dia dan bayinya akan baik-baik saja. Dan keyakinannya itu terwujud, dia bisa melahirkan dalam keadaan sehat.

Yuli sangat bersyukur kepada Allah SWT atas karunia ini dan berusaha mencari cara untuk menunjukkan rasa syukur tersebut. Jawabannya pun ditemukan saat menonton televisi yang memberitakan ada bayi yang dibuang oleh orang tuanya. "Saya pun mulai berpikir, kenapa saya tidak menunjukkan rasa syukur saya kepada Allah SWT dengan cara menolong bayi itu," tuturnya.

Jadilah sejak saat itu ia membuka hati untuk mulai mengasuh anak-anak yang terbuang sembari tetap mengasuh dan menyekolahkan anak-anak yang tidak



Kebiasaan rutin anak asuh Ibu Endang Yuli Purwati mengaji kitab suci Alquran (Istimewa)

mampu. Tepatnya pada 23 Februari 2004, ia pun mendapatkan bayi pertama laki-laki yang dibuang orang tuanya dan diberikan kepadanya untuk diasuh. Menyusul lagi pada 16 September 2004, ia mendapatkan anak asuh bayi laki-laki. Kemudian, tanggal 19 September ia mendapat bayi laki-laki, pada 29 Oktober dapat bayi perempuan, dan 10 Desember bayi perempuan. "Kami dapat bayi lima dan itu datang sendiri. Saya juga bingung kenapa bayi-bayi itu datang sendiri," ujar isteri Ahmad Badawi ini.

Tidak hanya dari Bandung, bayi terbuang bahkan pernah datang dari Jember, Jawa Timur. Ia menerima bayi tersebut dari ibunya yang dihamili entah oleh siapa dan merasa kebingungan merawat anaknya. Rumah Yuli di kawasan Kopo Permai, Sukamenak, Bandung, pun ramai oleh tangisan bayi. Ia dengan sigap langsung turun tangan menyiapkan susu formula, merapikan bayi, dan menggendongnya.

Yuli mengaku hampir tidak memiliki hambatan ketika mengasuh anak-anak dan bayi tersebut. Untuk membiayai semua kebutuhan anak-anak asuhnya itu, ia membuat usaha warung makan. Ia dan suaminya yang pensiunan BUMN tidak ingin meminta biaya dari pihak manapun, baik dari donatur atau pun membuka kotak sumbangan. Walaupun tak jarang ada saja para dermawan yang tanpa sepengetahuan mereka turut membantu. "Kami sangat bersyukur karena mendapat keberkahan rezeki sejak mengasuh anak-anak itu," katanya.

Bahkan, dia juga tidak mempublikasikan apa yang telah dilakukannya itu. "Karena kami anggap itu sama dengan membuka aib mereka-mereka yang melahirkan bayi yang tidak diinginkan. Kami sangat mencintai kehadiran bayi-bayi itu," ucapnya. Suaminya juga tidak mengizinkan untuk memasang plang yayasan atau panti asuhan di depan rumah mereka. Alasannya, itu bisa saja mempengaruhi psikis anak-anak asuhnya. "Kami berpikir anak-anak itu bukan butuh plang, bukan butuh panti asuhan, melainkan butuh ibu dan bapak," ujarnya.

Bayi dan anak-anak itu diasuh Yuli sepenuh hati dengan pendekatan kasih sayang dan keterbukaan. Ia juga memperlakukan



Ibu Endang Yuli Purwati bersama bayi barunya (Istimewa)

mereka sama seperti apa yang ia lakukan kepada anak-anak kandungnya. Dalam hal pakaian misalnya, ia tak pernah membedakan. Jika satu dibelikan pakaian baru, semuanya pasti dibelikan juga. Bersyukur, anak-anak kandungnya tak ada yang komplain.

Seiring perjalanan waktu, semakin banyak anak-anak terbuang yang datang kepadanya. Mereka ada yang berusia SMP, SMA, dan bahkan di antara mereka ada yang datang dalam keadaan hamil, baik dari hasil perkosaan maupun hasil perzinahan. Anak-anak ini diasuh dan dididik agar tidak kembali menjadi anak-anak yang terbuang. "Saat ini anak asuh saya tinggal 23 orang, yang lainnya sudah dikembalikan ke orang tuanya," ujar Yuli di malam penjurian 5 besar ASN Inspiratif 2018, di Studio TVRI Jakarta, akhir November 2018 lalu.

Yuli mengaku semua dilakukannya karena dirinya mau membuka hatinya untuk anak-anak tidak mampu dan terbuang. "Rumah saya sebenarnya biasa saja, tidak terlalu



luas. Tapi saya bisa melakukan itu semua. Yang dipentingkan itu tidak rumahnya yang diluaskan, tapi hati kita,” kata Yuli.

Inovasi dalam Mengajar

Di sekolah tempatnya mengajar, Yuli juga memosisikan dirinya sebagai ibu guru yang siap menerima keluh kesah para murid. Menurutnya, keluh kesah anak SD, SMP, dan SMA itu berbeda. SMA itu sudah ada rasa suka kepada orang lain, ada rasa pemberontakan kepada orang tua, ada pemberontakan kepada aturan-aturan. “Nah, saya tidak boleh ada batas dengan anak-anak, saya harus dekat dengan mereka,” katanya. “Beragam keluh kesah dan curhat disampaikan anak-anak ini. Ada di antara mereka yang berbuat salah, namun saya tidak menghakimi, bahkan tidak menceritakannya ke guru-guru lain,” tambah Yuli.

Sebagai seorang guru agama, ia juga memiliki cara yang inovatif dan menarik dalam mengajar di kelas sehingga para murid dapat benar-benar memahami pelajaran dan tidak



Keceriaan anak asuh Ibu Endang Yuli Purwati ketika sedang berekreasi bersama keluarga (Istimewa)



Di rumah pun, Ibu Endang Yuli Purwati aktif mengajar anak kandung dan anak asuhnya (istimewa)

mudah jenuh. Salah satu inovasi itu adalah mendisain pembelajaran mengenai pernikahan menjadi lebih menarik dengan langsung dipraktikkan dengan menyelenggarakan nikah massal di sekolah.

Acara ini juga dirangkai dengan kegiatan Festival Gifari dengan puncak acara pada tanggal 14 Februari. "Ini sekaligus untuk menangkal pengaruh negatif *valentine's day* bagi anak-anak," ungkap Yuli. Para murid dilibatkan dalam acara ini. Mereka menjadi WO (*wedding organizer*), mendekor ruangan kelas menjadi tempat pernikahan, menyiapkan hidangan, hingga mengundang tamu. Nikah massal pada Februari 2018 lalu bahkan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Andang Segara,

mewakili Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Festival Gifari sendiri berisi rangkaian kegiatan bernuansa Islami seperti lomba tahfiz Quran, lomba kaligrafi, cerdas cermat, dongeng kepahlawanan islam, dan sebagainya. Diundang pula tokoh atau *public figure* yang telah berhijrah untuk menceritakan pengalaman mereka mendalami agama agar bisa menjadi motivasi para murid.

Inovasi pelajaran lain adalah manasik haji yang didesain seolah-olah para murid memang akan pergi haji. "Kegiatan ini kemudian menjadi program sekolah, bukan program guru agama lagi dan akan tetap dilaksanakan meskipun saya tidak mengajar lagi," ucap Yuli yang sudah mendekati masa pensiun ini.

Nama`	: Endang Yuli Purwati
Tempat Tanggal Lahir	: Madiun, 1 Juli 1959
Pendidikan	: S1 Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
Pekerjaan/Jabatan	: Guru Agama Islam SMA Negeri 4 Bandung

Arti Kesuksesan

Yuli diangkat menjadi PNS sebagai guru di SKKP Negeri 1 Bandung pada tahun 1985 setelah menyelesaikan kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Setelah masuk kelas, ia merasa apa yang dipelajari selama betahun-tahun belum ada artinya ketika berhadapan dengan para murid. "Banyak kondisi di lapangan yang tidak sesuai dengan teori yang dipelajari saat kuliah. Jadi saya harus belajar terus," ujarnya. Pada tahun 1986, ia menemukan kasus 8-9 anak yang tidak bisa masuk kelas karena menunggak SPP. Dengan sukarela ia bayarkan SPP anak-anak tersebut secara mencicil dengan memotong gaji yang baru 80% diterimanya.

Awalnya, Yuli merasa tidak enak hati kalau aksi dermawannya itu diketahui guru-guru lain. "Saya kan guru baru, nanti bagaimana pandangan bapak-ibu guru yang lain," ujarnya. Beruntung, respons guru-guru lain sangat positif. Bahkan, mereka akhirnya ikut membantu dengan menyelipkan uang pada kotak makan yang dibawa Yuli ke sekolah. Sebagian uang itulah yang ikut digunakan membiayai perawatan anak dan bayi terlantar.

Kasus lain, ia menerima curhat seorang murid perempuan yang ketakutan kalau berada

di rumah. Selama seminggu anak itu menghilang, tidak bersekolah, kemudian muncul dan kembali menghilang. Setelah dibujuk oleh Yuli, ternyata anak tersebut ketakutan di rumah karena sering mendapati ayahnya masuk ke kamarnya dengan kondisi sudah tidak berpakaian. "Tentu saya harus mengambil tindakan dengan mengamankan anak tersebut dari kemungkinan tindak kekerasan," katanya.

Pada tahun 2000 ia pindah ke SMA Negeri 18 Bandung dan pada tahun itu juga ia terpilih menjadi guru terbaik Jawa Barat berdasarkan penilaian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Ia dianggap kreatif karena telah mempraktikkan cara mengajar sesuai Kurikulum 2013. Pada tahun 2005, Yuli pindah ke SMA Negeri 4 Bandung hingga saat ini. Selama kariernya, Yuli tetap menjadi guru biasa dan tidak mau ditugaskan menjadi wakil kepala sekolah.

Seluruh hati Yuli diberikan kepada murid-murid, anak dan bayi yang dia bantu. Bahkan dirinya rela tidak menyelesaikan kuliah S2 karena merasa lebih baik berbagi kepada anak-anak tersebut, membiayai pendidikan mereka. "Kesuksesan saya adalah kesuksesan anak-anak saya, kesuksesan suami saya, kesuksesan orang tua saya," ucapnya. (*)



Kegiatan OSIS di tempat Ibu Endang Yuli Purwati mengajar di SMA Negeri 4 Bandung. (Istimewa)

BIARLAH NAMAKU CUBAK

Petang kemaren kuputuskan untuk menemui Cubak lagi, gadis kecil penghuni panti asuhan tanpa nama itu. Berhari-hari igauanku selalu berputar-putar tentang misteri nama yang agak aneh. Kenapa harus diberi nama Cubak? Kenapa bukan Siti Maimunah? Mei-Mei? Upaq atau Rembulan? yang sangat sepadan dengan tubuh malaikat mungil berkulit kuning langsung dan bermata bening yang agak mirip etnik Banjar, Dayak, atau Tionghoa itu.



Kukayuh perlahan sepeda ontelku, khawatir tiga ikat buah rambutan dan es krim yang kusiapkan hanya untuk menjinakkan Cubak dan enam penghuni panti lainnya itu jatuh berceceran. Namun, jalan yang penuh lobang membuat aku gundah karena akan mengancam keselamatan nasib rambutan dan es krim itu.

Duhhh..... Dalam benakku, aku sempat marah. Kenapa ruas jalan yang menuju arah pinggir kota makin ke ujung kerusakannya semakin parah dibanding seputar kediaman gubernur jenderal atau tuan residen yang angkuh itu. Mendekati pengkolan dekat warung Kelontong Aboen, Cina totok asal seberang itu, kondisi jalan semakin menyempit mirip jalan setapak kerajaan purba. Duuhhh... motor berlawanan arah terus merangsek akan menabrakku. Aku makin grogi, stang sepeda ontel makin susah terkendali hingga terjadi kecelakaan tunggal.

Aku terguling lebih dulu di tanah berlumpur, rambutan berserakan di mana-mana dan nasib es krim tumpah menyatu dengan tanah berlumpur kental. Lama aku terduduk memandangi bungkusan tas kresek yang berisi buah tangan itu, sementara beberapa orang yang ada di pinggir jalan terkekeh-kekeh seakan menonton sirkus kampung. Sebelum berdiri, sengaja kupandangi mereka dengan senyum. Dan entah siapa yang memulai, akhirnya suara tawa meledak di pengkolan dekat warung Aboen itu.

"Hayyya, kamu olang sakit haaa, sini mali ke waroeng owe," tutur Aboen, pria buntel berkaos oblong sambil

menuntun sepedaku. Duhhh, hari gini masih ada orang baik seperti Aboen. Dan di benakku tiba-tiba menyimpulkan Cina yang satu ini baik hati juga.

"Loe cepet pegi dapur sana haaa, bawa tu ember, sini mali, tolong bapak ini," katanya setengah berteriak memerintah anak buahnya yang dari tadi terkekeh-kekeh menonton nasib burukku.

Aku sangat yakin, Koh Aboen menangkap isyarat kesedihanku ketika kupegang satu demi satu bungkus es krim yang pecah dan meleleh bercampur menjadi satu dengan air lumpur. Dan aku sangat yakin Koh Aboen menatapku ketika satu demi satu buah rambutan tiga ikat itu kubersihkan dengan penuh perasaan. "Koh Aboen, kamu baik, kamu pasti ditolong Dewa Kwan Tiem atas ketulusanmu itu," itulah sepotong kalimat sekenanya yang bias aku sampaikan ke Koh Aboen ketika aku berterima kasih dan pamit melanjutkan perjalanan.

Hampir dua tiang listrik sudah kulewati dengan mengayuh sepedaku. Lalu, kutengok kembali ke belakang, ternyata lelaki tambun itu masih memandangi sambil termangu. Memasuki gang sempit menuju panti asuhan tanpa papan nama itu, gerombolan anak kecil ikut berlari mengikutiku. Duhhhh... Ada apa lagi? Rupanya mereka berusaha mengambil rambutan yang menggantung di belakang sepeda ontelku. *Waahhhh ini perampokan kecil-kecilan!* Gumamku. Padahal, mereka inilah nantinya yang tumbuh besar dan menjadi pemimpin bangsa ini pikirku lagi. *Tidak, ini tidak boleh terjadi.* Aku berhenti sejenak. Supaya mereka mengerti, kuberi mereka satu ikat rambutan. Dan...benar, calon preman itu akhirnya kabur sambil terkekeh-kekeh layaknya sekawanan pemenang.

Di depan rumah panggung yang dijadikan panti asuhan itu tampak sepi. Tapi, pintu dan jendelanya dibiarkan menganga. Kutengok di sisi rumah tidak ada tanda-tanda dan suara orang. Yang kulihat hanya jemuran bertali ijuk yang dipadati tumpang tindih pakaian lusuh. Di situ ada bantal, di situ ada ikan asin yang diletakan di dalam niru, dan di situ juga ada

karung goni yang menghiasi jemuran mirip pasar malam.

Di tiang jemuran, terlihat sepasang sepatu anak kecil yang di bagian depannya sudah agak menganga. Aku yakin betul...ini pasti sepatu Cubak yang selalu setia menemaninya pergi sekolah TK. Tapi, kenapa ini dijemur???

Seotong pertanyaan lain yang perlu kutelusuri karena hari ini bukan hari libur. Pasti ada sesuatu yang meriwayatkan kenapa sepasang sepatu kebanggaan Cubak ada di situ.

Sudah tiga kali salam kuucapkan, tetapi belum juga ada jawaban dari dalam rumah. Aku makin gundah...dan kalimat curiga tiba-tiba tercetus dari mulutku. "Jangan-jangan" *Enggak!* Aku mengendap ke belakang rumah, juga tak terdengar suara apa pun. Ingin kuputuskan menaiki anak tangga, tapi takut dikira maling. Namun, dari jendela rumah sebelah, terdengar suara sangat jelas yang memberi tahu bahwa seisi rumah ini baru saja pergi ke rumah sakit menengok Cubak yang lagi dirawat karena tenggelam di air pasang.

Cubak terjatuh ketika menyeberangi jembatan di depan sekolah TK yang tak jauh dari rumahnya. Aku sempat terduduk lemas. Bayangan gadis kecil berumur empat tahun yang pernah kutemui pekan lalu makin membayang di mataku. Bocah yang pernah menyanyikan lagu "Kasih ibu", sebuah lagu syahdu yang sempat membuatku meneteskan air mata itu, sekarang lagi dalam kondisi kritis. Lamunanku melesat mundur tentang bocah yang pernah menyita jiwa ragaku ketika ia meronta agar aku jangan pulang saat mengunjungi panti asuhan tempat ia berteduh pertama kali. Saat itu, dia terdiam seketika setelah permintaannya kupenuhi untuk memberinya foto keluargaku.

Aku masih ingat tentang cerita Cubak si bocah cerdas yang dengan bangga menunjukkan foto itu seraya menjelaskan bahwa itulah foto orang tuanya kepada Marto, sahabatnya yang selalu mengejek nasib ke yatim-piatuan Cubak. *Cubak, bertahanlah Nak! Abah segera menyusulmu.*

Tanpa ba-bi-bu, kukayuh sepeda ontelku menuju rumah sakit. Bodo, planting plentong

sepeda menari-nari di samudera lobang jalan yang tak keruan itu. Kulewati kembali pengkolan becek di depan warung Aboen. Tak peduli lagi jalan licin lokasi tadi aku sempat tumbang. Tak peduli lagi dengan warga yang terkesima melihat kegilaanku menunggang sepeda mirip peserta lomba *motorcross* yang sudah kesetanan. Tak peduli kekehan tawa dan sapaan orang di sekelingku. Tujuanku hanya satu, aku harus segera bertemu Cubak! Titik.

Tak berapa lama, bunyi klakson motor berulang-ulang dibelakangku. Lagi-lagi aku tak peduli. Hingga akhirnya, aku terpaksa berhenti karena motor itu makin memepetku. Duuhhh, rupanya Koh Aboen yang dengan hati-hati bertanya tentang sikapku sambil menyerahkan bungkus plastik bertulis "Toko Lima Cahaya", nama warung Koh Aboen yang terkenal di kampung itu. Ketika kucoba melirik isinya, Koh Aboen mencegahnya. "*Sulah-lah, owe hanya ganti elo punya es krim...telima, tulung telima,*" katanya dengan aksen lidah pelot bercampur cadel.

Aku akhirnya menyerah ketika dia menawarkan untuk naik motornya sampai ke rumah sakit, setelah aku bercerita mengapa aku harus terburu-buru mengayuh sepeda. Selama perjalanan, dia berbicara bagai muntahan meriam, tanpa henti tapi tak begitu jelas. Selain pelot tak ketulungan, suaranya terhalang helem mirip kerongkong rumah kura-kura. Supaya merasa sama-sama enak hati, aku selalu jawab "Iya, Koh" "Betul, Koh" "Oh, gitu ya?".

Ketika sampai di parkir rumah sakit, Koh Aboen nampak merah mukanya. "Kenapa Koh Aboen?" tanyaku pendek. Rupanya selama perjalanan dia bicara bahwa aku mengayuh sepeda seperti orang kesetanan, dia berpikir apakah aku sudah gila, atau merasa frustrasi dan seterusnya. "*Hayyya kamu olang cakap iya,iya,iya, telus jawab iya,betul, iya.....owe makin tak faham,*" katanya tanpa meneruskan lagi ucapannya. Namun, kelucuan itu memancing kami untuk tertawa terbahak-bahak.

Di bangsal rumah sakit itu banyak sekali orang. Ruangannya terasa pengap, bau, dan kotor. Tidak jelas mana yang pasien dan mana yang bukan karena mereka semuanya tampak

sama-sama sakit. Ruangan yang menampung pasien orang-orang miskin itu mirip tempat pengungsian bencana alam. Di sana-sini, tali jemuran berseliweran dan menjadi tempat menggantung bermacam-macam barang. Mirip pasar kaget yang digelar setiap pekan di kampungku.

Agak susah menemukan di mana Cubak berbaring. Namun, tiba-tiba aku disentakkan dengan pelukan bocah cilik bernama Midah, teman Cubak yang dahulu pernah ikut bergelayutan di punggungku ketika aku ke panti asuhan itu pekan lalu. Aku yakin sekali itu Midah karena ciri khas ingus yang meler mempertebal pipi montoknya tak pernah hilang. Kulihat ibu asuhnya Siti Syamsiah membelai Cubak yang terbaring di kasur tipis rumah sakit itu.

Aku dan koh Aboen sengaja membiarkannya, aku menikmati pemandangan dramatis tentang seorang ibu asuh yang walaupun hanya penjual kue basah, tetapi tidak mengurangi kemuliaan hatinya menyelematkan nyawa Cubak. Perempuan setengah baya itu melebihi cara Ibu Theresia menyentuh kaum miskin di India. Karena dari tangan perempuan itu, Cubak terselamatkan sejak ia pungut di pinggir jalan hingga tumbuh seperti sekarang.

Dari belakang, kulihat ibu Siti Syamsiah berkali-kali mengusap air mata dengan jilbabnya. Sementara itu, lambat-lambat kudengar ayat-ayat kitab suci melantun perlahan berisi doa-doa. Sangat jelas bibir Cubak mulai tersungging ketika kedua mata kami berada dan tiba-tiba tubuh kecil itu dipeluk rapat Ibu Siti Syamsiah yang tak henti mengucapkan *Allahu Akbar! Allah Mahabesar!* hingga memancing mata seluruh penghuni ruangan tertuju ke tempat tidur yang ada di pinggir jendela bangsal rumah sakit itu.

"Bunda...." itulah kalimat pertama setelah tiga hari ia dirawat, sambil menuntun matanya ke arahku seakan memberi tahu bahwa tidak hanya ibu Siti Syamsiah dan seisi panti asuhan yang bersedih, tetapi ada orang lain yang sejak pekan lalu dipanggilnya "abah". Perubahan sangat drastis terjadi, ketika kami bercengkerama di dipan rumah sakit yang mulai reot serta di sana-sini penuh tulisan layaknya



Panti asuhan tanpa nama, tempat berteduh Cubak beserta anak terbuang lainnya. (Ilustrasi)

corat-coret dari tangan jahil pelaku vandalisme. Cubak mencoba duduk dan berpindah ke asuhanku ketika aku suguhkan bungkus berisi es krim dan buah rambutan sisa dua ikat itu. Bibirnya nampak kering, badannya lunglai dan matanya sayu. Ya, sangat sayu dan tidak sebening ketika kami bertemu pekan lalu.

Tapi matanya tak berkedip menatap wajahku dan aku sangat paham, pasti ada suatu pesan yang ada di balik itu. "Abah...." demikian kata lirih yang menyentak lamunanku sebelum kupeluk dia dan kucium dia hingga pipinya basah oleh deraian air mata kami yang luruh dalam haru petang itu. Tak tahu, tiba-tiba pundakku terasa berat, ternyata tangan kekar Koh Aboen menumpang dan kami berpelukan bertiga. Kulirik lengan kanan kaos oblong koh Aboen ikut basah. Rupanya dia sejak tadi juga ikut meneteskan air mata menyaksikan drama kemanusiaan itu.

Cubak makin terlihat sehat dan mulai berceloteh dengan lidah pelatnya. Dia sempat bertanya jenis makanan yang kuberikan karena dia tak pernah tahu dan seumur hidupnya baru kali ini menikmati makanan yang namanya es krim. Sendok kayu pinus itu selalu tak bersisa dari es krim yang diciduknya. Dia jilati perlahan-lahan dan aku tambah yakin bahwa Cubak lagi-lagi menikmati makanan orang kota itu.

"Cubak, anak Abah. Es krim ini pemberian Koh Aboen," kataku menghibur sambil memandangi Koh Aboen yang masih saja terkesima. Kelakar kecil mulai mencairkan suasana, bahkan ibu Siti Syamsiah sudah dapat bercerita bahwa Cubak ditemukan warga pingsan terbawa arus sebelum dibawa ke tempat mantri suntik yang tak jauh dari rumahnya. Beberapa hari Cubak sempat koma dan kemudian ditempatkan di bangsal itu. Bangsal rumah sakit mirip ruang kuliah itu

berseberangan dengan bangunan rawat inap VIP. Yang memisahkan hanyalah lahan yang di sana-sini ditumbuhi semak perdu. Tumbuhan berduri menjalar ke mana-mana dan di situ kadang-kadang ada ular belang melintas. Itu sebabnya, keluarga pasien lebih suka membuat jemuran di dalam ruang bangsal.

Hanya ada lorong kecil yang menghubungkan kedua bangunan tersebut. Itu pun tidak sembarang orang boleh melintas karena beberapa penjaga bertampang sangar dan menakutkan berjaga-jaga 24 jam. Bangunan di seberang itu terlihat lebih asri, terang benderang, ber-AC, dan manusia yang lalu-lalang pun berpakaian rapi. Begitu juga dokter dan perawatnya terlihat murah senyum dengan pasien dan keluarganya. Aku tidak begitu mengerti tentang adanya tulisan ruang inap "VIP". Namun, hanya satu yang terlintas dalam benakku, bahwa hanya orang tertentu dan berduit yang mampu menikmati fasilitas itu.

Sesekali pandangan kami beradu, dan seketika itu pula Cubak berusaha memaksakan diri untuk tersenyum kepadaku. Duhhh si bocah cilik ini, sangat pandai mengambil hati, seakan ia sudah melupakan nasib dirinya yang sempat mendekati titik kritis menuju gerbang kematian.

"Abah, aku sudah memaafkan si Marto. Bahkan, dia memberi aku beberapa keping foto keluarganya," demikian kalimat yang keluar dari mulut Cubak tiba-tiba. Aku mencoba tidak menanggapi tentang cerita foto itu, termasuk ketika Koh Aboen bertanya-tanya tentang hal itu.

Cubak makin erat memelukku seakan ingin membisikkan sesuatu. Kugendong dia pelan-pelan sambil kulantunkan tembang timangan seperti yang dahulu sering kudengar dari kedua orang tuaku.

Koh Aboen berjalan mengikutiku bagai seorang ajudan. Dia tak berhenti mengoceh dan bertanya tentang siapa dan dari mana anak ini. Untungnya logat cadel Cinanya tak begitu dimengerti Cubak, dan aku pun ttak mau meladeninya.

"Hayyya, kamu olang tak mau bicala-bicala, owe tanya, kamu olang diam semua," celetuk

Koh Aboen terlihat kesal. Suhu badan Cubak terasa hangat dan dia mulai terlelap dalam gendonganku. Ketika akan memindahkan ke tempat tidur, Koh Aboen tampak sibuk membereskan alas tidur dan bantal. Di sisi tempat tidur kayu itu, aku, Koh Aboen, dan Bu Siti Syamsiah sempat berbicara tentang musibah yang dihadapi keluarga panti asuhan itu.

"Doakan Pak, semoga Cubak cepat sembuh," tutur ibu asuh itu sambil berlinang air mata dan berusaha menghapusnya dengan jilbabnya.

Petang itu, aku mencoba mendengarkan cerita Ibu Siti Syamsiah tentang anak asuh kesayangannya itu. Cubak bagaikan primadona dan cahaya bagi panti asuhan sekaligus rumah keluarga besarnya. Aku paham, di balik ucapan itu pasti menyangkut biaya rumah sakit. Selama beberapa hari belakangan ini, tidak berjualan kue. Begitu pula suaminya yang terpaksa meninggalkan pekerjaan pokoknya sebagai tukang kayu.

Kutarik tangan Koh Aboen, lelaki tambun yang beberapa jam lalu baru kukenal. "Koh Aboen, sebelumnya aku berterima kasih banyak atas bantuanmu," kataku berbisik. Kalimat itu berhenti sampai di situ. Padahal, aku ingin menyampaikan keinginan untuk meminta bantuan pinjaman uang dengan cara menggadaikan sepeda ontelku kepada Koh Aboen.

Kami sempat berbicara panjang tentang siapa aku, siapa Cubak, siapa Ibu Siti Syamsiah serta status panti asuhan tanpa papan nama itu. Aku juga bercerita tentang nama Cubak yang hingga kini masih misteri dalam benakku.

"Hayya..itu soal duit bagi owe tak masalah, belapa lu mau sekalang tak masalah, tak payah lu gadai-gadai itu sepeda, owe kasih pinjam sekalang, tak payah bayar bunga," kata Aboen hampir-hampir tak bernapas menyelesaikan kalimat itu. Namun suara cadel dan sedikit keras itu sempat membangunkan Cubak.

"Maaf haah, owe cakap banyak sama lu," katanya lagi sambil mengeluarkan bungkus plastik berisi uang untuk pembayaran biaya



Keceriaan anak-anak yatim piatu. (Ilustrasi)

rawat inap Cubak. Cubak sempat melirik Koh Aboen menghitung uang kemudian diserahkan kepada Bu Siti Syamsiah. *"Kami orang Cina bilang anak ini banyak untung haaa,"* kata Koh Aboen berbicara sendiri sambil mendekati Cubak dan bertanya berkali-kali tentang nama yang terkesan aneh itu walaupun Cubak sudah menjawabnya. Mirip seperti orang yang lagi berceramah, menurut Koh Aboen, gadis kecil ini seharusnya memiliki nama yang cantik, secantik dan semanis orangnya.

"Abah, biarlah namaku Cubak saja", tiba-tiba Cubak menyahut pelan. Aku mencoba mendekati sisi pembaringannya. Kuelus tangannya dan kuusap wajahnya dengan penuh kasih sayang. Ketika kupandangi wajahnya, raut wajah Cubak mengisyaratkan sebuah ekspresi tentang sesuatu yang sengaja dipendamnya.

Lama kami berpandangan tanpa kata-kata. "Biarlah namaku Cubak saja. Kalau diubah aku takut Abah tak menyayangiku lagi," kalimat pendek itu meluncur bagai halilintar. Kalimat itu berisi sejuta pesan tentang makna kasih sayang sesama manusia dan kalimat itu kuyakini tidak akan keluar begitu saja tanpa bimbingan para malaikat. Lagi-lagi ku peluk tubuh mungil itu

dan lagi-lagi air mataku tumpah. Dalam pekan terakhir, gadis cilik ini sudah beberapa kali menguras air mataku. Air mata haru dan air mata rasa malu, mengapa anak manusia yang secerdas dan secantik Cubak harus menerima kekejaman dunia. Dia nampaknya sangat bangga akan nama itu, nama yang tak lazim di kampung itu dan makin tak lazim jika mengacu nama-nama anak perempuan saat ini.

Melalui tuturan Ibu Siti Syamsiah, pemberian nama itu muncul dari pemberian enam saudaranya yang sama-sama ditampung di panti itu. Logat anak kecil untuk mengatakan kata bungsu...biasa disingkat menjadi "cu" dan nama "bak", ternyata memiliki riwayat rumit dan dramatis tentang kisah penemuan Cubak. Bocah cilik itu ditemukan di pinggir bak sampah dalam kondisi memprihatinkan. Kemudian dia diserahkan ke panti asuhan dalam kondisi seperti itu. *Masya Allah!* aku tak tahan mendengar kelanjutan cerita Ibu Siti Syamsiah itu. Aku menangis, dadaku terasa sesak dan pandanganku mulai berkunang-kunang. Tiba-tiba kudengar di belakangku bunyi orang jatuh. *Gedebuk!* ternyata koh Aboen tumbang dan pingsan mendengar drama kemanusiaan yang sulit dicerna akal sehat itu. (emte)

“Dopari Sakatu”

Cara Guru Berkomunikasi Inovatif

Rata-rata kelas mayoritas siswa di SDN 02 Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hal ini terjadi karena kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Selain itu, adanya kenakalan siswa menunjukkan kurangnya pendidikan karakter pada siswa SDN 02 Mojorejo. Lalu, hadirilah seorang guru, Dhelly Perwita Sari, yang akhirnya mengubah segalanya melalui jargon “Dopari Sakatu”.

Untuk memberikan pendidikan karakter pada siswa tidaklah mudah, diperlukan pendekatan yang lebih preventif dan berkelanjutan. Memberikan teladan yang baik merupakan salah satu bentuk pendekatan yang tepat bagi siswa. Untuk memberikan teladan yang baik pada anak-anak usia kelas 1 s.d. 6 Sekolah Dasar, dibutuhkan cara komunikasi khusus, komunikasi yang mudah dipahami oleh siswa. Dalam hal ini, karakter tidak dapat dibentuk tetapi ditumbuhkan dengan rangsangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Setiap sekolah harus menjadi tempat yang nyaman dan inspiratif bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.

“Teng-teng-teng” bel sekolah SDN 02 Mojorejo berbunyi. Kamis pagi waktu menunjukkan pukul 06.45 WIB. Tak terlihat satu pun siswa datang terlambat. Siswa-siswa bersemangat menuju lapangan sekolah. Hanya diperlukan waktu tidak kurang dari lima menit, 552 siswa berbaris rapi tanpa ada aba-aba keras dari guru. Mereka tahu di mana barisan kelas mereka masing-masing. Dengan suara lantang dan semangat, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stanza, mars PPK, dan duduk tenang untuk mendengarkan *DOPARI SAKATU*.

Tidak ada buku, tidak ada pena, 552 siswa duduk tenang dan santai menikmati indahnya

alunan suara pendongeng. Dongeng yang dibacakan pada hari itu berjudul “Ulil Si Kupu-Kupu”. Para siswa fokus mendengarkan dengan wajah sedikit penasaran tentang jalannya cerita. Mereka menikmati dongeng yang dibacakan oleh Ibu Dhelly, seolah-olah merekalah pelaku utama dari dongeng tersebut.

Tiba saat yang ditunggu, pendongeng mulai menawarkan Bintang *DOPARI SAKATU* yang setiap hari dibagikan. Wow! laris manis seperti kentang goreng, mereka begitu tertib berbaris untuk sekadar menjawab pertanyaan dari pendongeng. Tidak lupa, pin *DOPARI SAKATU* sebagai kebanggaan siswa SDN 02 Mojorejo juga turut dihadiahkan. Pin yang sangat mahal, bukan karena harga melainkan karena sulit dan tak terduga dalam mendapatkannya. Pin yang bisa didapatkan oleh siswa kelas berapa saja. Siswa yang fokus, disiplin, mampu menjawab atau menceritakan kembali dongeng yang dibacakan, atau bahkan simpati kepada teman bisa mendapatkan pin tersebut.

Tidak selesai sampai di situ, siswa masuk ke kelas dengan tertib tanpa ada yang berlari setelah selesai *DOPARI SAKATU*. Di dalam kelas, mereka langsung membuka buku *DOPARI SAKATU* dan menulis kembali dengan bahasa mereka sendiri. Menulis karakter positif yang harus ditiru dan karakter jelek yang harus dihindari.

Itulah kegiatan *DOPARI SAKATU*, dongeng pagi hari Selasa, Kamis, Sabtu yang sudah

diterapkan sejak tahun 2016. *DOPARI SAKATU* merupakan cara untuk menanamkan teladan kepada para siswa yang disampaikan dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Apalagi sasarannya adalah murid SD kelas 1 sampai dengan kelas 6.

DOPARI SAKATU adalah inovasi dalam menumbuhkan karakter positif sehingga masalah nilai rata-rata kenaikan kelas siswa yang rendah yang disebabkan oleh ketidaksiplinan, kenakalan, dan kurangnya tanggung jawab siswa dapat ditanggulangi. Inovasi *DOPARI SAKATU* merupakan upaya kreatif sekolah untuk menumbuhkan karakter positif siswa dan menanamkan moral yang baik. Sebab, di akhir kegiatan mendongeng, pendongeng selalu berinteraksi dengan siswa. Ia juga menanyakan karakter positif apa yang harus ditiru. Dengan demikian, tercipta komunikasi dua arah. Ini sangat berbeda jika siswa dibiarkan menonton cerita melalui televisi atau mengunduh aplikasi dongeng pada *gadget*. Sebab, kegiatan menjadi satu arah sehingga siswa belum mengerti bagian mana yang baik atau buruk untuk ditiru. Inilah yang mendasari penggunaan dongeng karena sasaran utama dari inovasi ini adalah siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 (usia 7-12 tahun).

Dua tahun ini perolehan nilai rata-rata rapor para siswa meningkat. Artinya, Dari 39% siswa dengan rata-rata kelas belum memuaskan menurun menjadi 25%. Hal itu disebabkan meningkatnya kedisiplinan siswa dengan jumlah keterlambatan menjadi 2 sampai dengan 3 siswa per hari, bahkan tidak ada sama sekali. Pun dengan menurunnya tingkat kenakalan siswa hasil menunjukkan bahwa tingkat kenakalan pada peserta didik dalam satu bulan berkurang menjadi 78 kasus setiap bulannya dengan rata-rata per hari 3 kenakalan dalam



Guru Dhelly Perwita Sari berinovasi melalui media dongeng di hadapan anak didiknya. (Istimewa)

setiap kelasnya.

Inovasi *DOPARI SAKATU* mampu menggerakkan partisipasi siswa, wali murid, maupun masyarakat (mahasiswa yang magang). Yang menjadi pendongeng tidak hanya sebatas guru, tetapi juga siswa, wali murid, dan masyarakat. Kerena itulah, peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam membentuk karakter positif anak terwadahi dalam *DOPARI SAKATU*. Ketika karakter siswa sudah terbentuk menjadi karakter positif, nilai akademik siswa pun akan meningkat.

Keberhasilan inilah yang sudah mulai direplikasi di SDN 02 Pandean melalui sosialisasi *DOPARI SAKATU* di delapan SD dan satu SMP. Ketika disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran mulai tumbuh pada siswa maka peningkatan nilai akademik pun bisa diraih. Banyak hal bisa direplikasi dari kegiatan mendongeng ini, salah satunya yang sudah dikembangkan adalah keberadaan RUMAH DONGENG. Rumah ini berisi tentang kumpulan dongeng-dongeng yang sudah diarsipkan, properti dongeng, buku-buku tulisan siswa yang berisi rangkuman dongeng dan bintang *DOPARI SAKATU*. (*)

MENCEGAH FRAUD DENGAN MEMBELANJAKAN DANA PENDIDIKAN SECARA NONTUNAI (*CASHLESS*)

Teknologi digital beberapa tahun terakhir berkembang dengan pesat. Tidak hanya perlengkapan elektronik yang semakin canggih, tetapi teknologi di sektor keuangan pun berkembang semakin maju dan kreatif. Pembayaran secara mudah dan transparan dalam transportasi umum Transjakarta, KRL, jalan tol bebas hambatan, yang awalnya menggunakan uang fisik, kini sudah beralih dengan tap kartu. Ketika kita *order* membeli makanan (*Go Food*) atau berbelanja di supermarket dan minimarket, dengan mudah kita menggunakan *tap* kartu. Kemudahan seperti inilah yang mendorong kita untuk mendukung gerakan nontunai (*cashless*).



Oleh: Dr. Fuad Wiyono, S.H., M.H.
(Auditor Ahli Utama dan Mantan Inspektur Investigasi Itjen Kemendikbud)

Beda kartu kredit dengan *tap* kartu, kartu kredit memiliki *limit* yang besar sedangkan kartu *tap*, perlu dilakukan *top up* terlebih dahulu, baru bisa digunakan. Perkembangan dalam menciptakan kemudahan pembayaran menggunakan uang tunai, beralih menjadi nontunai atau *cashless*, yaitu melakukan transaksi tanpa menggunakan uang tunai, namun menggunakan transfer, cek, bilyet giro, kartu kredit hingga *tap* kartu (*e-money*). Jika diikuti perkembangannya istilah *cashless* sendiri semakin populer dengan melihat jumlah transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang fisik semakin besar, terutama kota-kota besar di Indonesia.

Di era globalisasi dan digitalisasi seperti ini, setiap orang pasti ingin bergerak cepat dan praktis. Sistem *cashless* atau *tap* kartu di beberapa transportasi publik, dapat mengurangi antrean panjang, baik antrean KRL, transjakarta, atau pun memasuki gerbang pintu tol. Seiring dengan perkembangan *cashless*, tidak hanya perbankan yang mengeluarkan kartu *tap*, tetapi

perusahaan operator telekomunikasi pun tidak mau ketinggalan.

Apakah Anda pernah mengalami hal ini, Anda memiliki uang Rp 50.000,00 lalu belanja dengan uang tersebut setengahnya atau kurang. Anda akan menerima kembalian yang biasanya 'recehan'. Setelah itu, biasanya recehan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dalam arti bukan hilang yang sebenarnya, tapi hilang tanpa catatan pengeluaran yang jelas. Saya rasa, selain saya, Anda juga pernah mengalami hal ini. Dengan kemudahan kartu *tap* ini, Anda dapat mengatur keuangan yang lebih baik. Pengeluaran Anda jadi lebih tercatat dan efisien dengan menggunakan kartu *tap* ini.

Di Indonesia sendiri, sendiri sudah diperkenalkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Bahkan, Jakarta ketika Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI juga sudah mulai berbenah diri dengan memperkenalkan warganya pada Kartu Jakarta Pintar untuk pelajar yang meminimalisasi

penggunaan uang tunai. Kemudian, ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan masyarakat *e-cashless* sendiri sebaiknya mulai diberdayakan untuk membantu kaum yang berkekurangan di ibu kota. Hal ini akan membantu pendistribusian dana untuk kaum berkekurangan di Jakarta dan memperbaiki layanan publik.

Saat ini, sistem tanpa uang tunai sudah menjadi gerakan tersendiri. Beberapa keuntungan bisa didapatkan dengan beralihnya era uang fisik menuju era *cashless*. Mungkin ini adalah awal dari berubahnya isi dompet kita, yang tadinya uang fisik, menjadi tumpukan kartu atau malah mungkin dompet Anda akan berubah bentuk menjadi virtual.

Pada saat ini pun perencanaan anggaran kementerian/lembaga sudah bergerak menuju sistem pembayaran nontunai dan perlahan akan meninggalkan pendekatan lama yakni *money follow function* atau anggaran mengikuti fungsi kementerian/lembaga masing-masing. Padahal, pemerintah berharap penganggaran berdasarkan program atau *money follow program* akibat dari penyusunan anggaran mengikuti fungsi, maka kementerian/lembaga tidak bisa optimal dalam mengeksekusi sumber daya yang telah disediakan. Hal ini berakibat pada tingginya *idle money* dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga, yang sesungguhnya dapat digunakan untuk membiayai program yang lain.

Berdasarkan hasil temuan BPK ternyata masih terdapat penggunaan anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya pembayaran perjalanan dinas melebihi standar, belanja tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak didukung bukti yang sah. Demikian pula dengan belanja operasional, misalnya kekurangan volume pekerjaan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran atas pembelian peralatan yang tidak dipergunakan.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mewacanakan

penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pembiayaan program dan kegiatan pada kementerian/lembaga sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Penggunaan kartu kredit pemerintah ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi *fraud* dari transaksi secara nontunai, dan mengurangi *cost of fund/idle cash* dari penggunaan uang persediaan. Pada tahap uji coba proyek penggunaan kartu kredit pemerintah ini ada empat instansi yang menerapkannya, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekretariat Negara (Setneg), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Inspektorat Jenderal sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai *awareness* terhadap wacana pemberlakuan kartu kredit pemerintah sebagaimana yang diwacanakan oleh Kementerian Keuangan tersebut, mengingat anggaran yang disediakan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cukup signifikan dalam APBN dan disinyalir masih terdapatnya *idle money* di setiap tahun anggaran.

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nontunai Upaya Mencegah Fraud

Dengan dana BOS nontunai, akan mudah mengontrol apabila ada penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya dan mencegah kebocoran anggaran. Program percontohan yang baru di delapan provinsi ini akan diperluas ke semua sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilibatkan karena transfer dana BOS melewati bank yang berkompeten. Rekomendasi Bank Indonesia dengan PT Bank Pembangunan Daerah dinilai paling siap secara infrastruktur keuangan digital. Untuk di Samarinda saja, totalnya sudah ada 12 sekolah dasar hingga menengah yang ikut program percontohan ini.

Untuk tahun 2019, akan dilakukan perluasan di seluruh provinsi, tiap-tiap provinsi satu kabupaten berjenjang 4 SD, 4 SMP, 4 SMA. Program ini sesuai program nawacita pemerintah dalam mewujudkan keuangan inklusi mencapai 50% penduduk. Selain, kunci penguatan tata kelola dana pendidikan. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi transaksi di bawah meja. Semua transaksi BOS harus transparan dan akuntabel. Di sisi lain, belanja negara secara nominal terus meningkat dari tahun ke tahun dan harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja (*value for money*) yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Isu utama dalam rangka pencapaian *value for*

money adalah kemampuan untuk mengeksekusi belanja (pelaksanaan anggaran) dan efisiensi penggunaan anggaran.

Praktik Baik Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Delapan Provinsi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong transaksi nontunai di dunia pendidikan. Lewat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) nontunai di dunia pendidikan kini pencairan, pembelian, dan pelaporan BOS menjadi lebih transparan dan mudah. Program tersebut, serupa transaksi di aplikasi belanja *online* yang telah diujicobakan di delapan kota di Indonesia yang jadi percontohan. Uji coba dimulai sejak tanggal 20 Maret 2017, ditandai dengan keluarnya Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1943/D/KU/2017. Diteruskan pelaksanaan efektif uji coba sehari setelahnya.

Berbeda dengan sistem BOS konvensional, yakni transfer pusat ke daerah, dan pencairan tunai ke sekolah disertai pelaporan fisik. Lewat sistem BOS nontunai ini, kepala sekolah dan bendahara yang ditunjukkan sebagai pihak berwenang, bisa membelanjakan 40% dana BOS lainnya transaksi lewat aplikasi belanja *online*. Besar kemungkinan, jika sistem ini berhasil, persentase nontunai akan ditingkatkan. Caranya, kepala sekolah tinggal masuk ke aplikasi SIBOS di *website*. Di aplikasi, tinggal mencentang pesanan barang kebutuhan sekolah lewat aplikasi yang terhubung dengan rekanan.

Setelah selesai dipesan, *print out* pesanan berupa *QR code* dibawa ke tempat pembelian. Bisa dikirimkan menggunakan kurir atau langsung. Di tempat pemesanan, rekanan akan memindai *QR code* tadi dan menyiapkan barang pesanan untuk dibawa atau dikirimkan langsung ke sekolah. Setelah barang sampai di sekolah, pemesan tinggal mengonfirmasi pesanan telah sampai lewat aplikasi SIBOS. Otomatis pesanan dan pembukuan keuangan digital dinyatakan berhasil. Semudah Anda memesan barang lewat aplikasi pembelian *online* kekinian. Sistem baru ini, bisa meningkatkan efektivitas. Barang yang dibelanjakan sesuai peruntukan dan transaksi tercatat secara detail. (*)

Program Magang di Luar Negeri bagi PNS Baru

Pengembangan kompetensi merupakan investasi utama dalam organisasi modern. Sumber Daya Manusia sebagai asset utama organisasi harus selalu dikembangkan kompetensinya secara berkala dan berkesinambungan. SDM yang kompeten merupakan syarat utama bagi organisasi pembelajar (*learning organization*) agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Dalam konteks ini, pengalaman internasional sangat penting untuk memperluas wawasan pegawai. Karena itu, dirancang program magang di luar negeri bagi pegawai baru.



Oleh: Agam Bayu Suryanto
(Kabag Pengembangan dan Penghargaan -
Biro SDM, Sekretariat Jenderal)

Pada tahun 2018 digulirkan program baru untuk meningkatkan kompetensi pegawai yaitu Magang (*secondment*) di luar negeri. Sebelumnya, program magang seperti ini belum pernah dilaksanakan. Program magang menggunakan pendekatan pembelajaran dari pengalaman (*experiential learning*) yang membekali pegawai dengan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural.

Program magang ini dirancang sebagai bagian dari paket pengembangan kompetensi pegawai terpadu yang mengkombinasikan berbagai metode secara sinergis antara lain beasiswa pendidikan formal, pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pelatihan, pembelajaran elektronik (*e-learning*), *mentoring*, *coaching*, magang, dan lain-lain. Program magang ini menggunakan pendekatan *secondment* yang bermakna bekerja bersama-sama dengan mitra (*to work with*) di unit magang. Program ini berbeda sama sekali dengan magang yang menggunakan pendekatan *apprentice*, yaitu

bekerja sambil belajar (*on the job training*). Pendekatan *secondment* menuntut pegawai untuk mampu beradaptasi dengan budaya kerja dan budaya negara penempatan magang secara cepat serta mampu bekerja sama dengan koleganya.

Sasaran program ini adalah pegawai dari CPNS formasi 2015. Magang akan dilakukan pada SEAMEO (*South East Asian Minister of Education Association*) dan pusat-pusat yang berada di enam negara ASEAN, yaitu Thailand, Singapura, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Ada sembilan pusat SEAMEO yang menjadi lokasi penempatan magang sebagai berikut:

1. *SEAMEO Secretariat*, Bangkok, Thailand
2. *Community Education Development*, Vientiane, Laos
3. *SEAMEO Regional Centre for Archeology and Fine Arts (SPAFA)*, Bangkok, Thailand
4. *Center for History and Tradition (CHAT)*,

Yangon, Myanmar

5. *Regional Language Centre (RELC)*, Singapura
6. *Regional Centre for Higher Education and Development RIHED*, Bangkok, Thailand
7. *Centre for Education in Science and Mathematics (RECSAM)*, Penang, Malaysia
8. *Centre for Special Education (SEN)*, Melaka, Malaysia
9. *Regional Training Centre (RETRAC)*, Ho Chi Minh City, Vietnam

Para pegawai peserta program magang ini dipilih berdasarkan potensi dan wawancara yang dilakukan secara objektif. Peserta diwawancarai oleh Tim panel yang terdiri dari Sekretariat SEAMEO, Biro SDM, dan Biro Perencanaan dan Kerja sama Luar Negeri. Kandidat magang diujai sejauh mana motivasinya, kecakapan berbahasa Inggris, kematangan, kemandirian, keterampilan mengatasi masalah, dan pengetahuan tentang SEAMEO. Dari hasil wawancara disepakati 16 orang pegawai terpilih untuk mengikuti program magang ini.

Pegawai akan menjalani magang selama tiga bulan dimulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2018. Pegawai dituntut untuk memahami budaya negara tempatnya magang. Pengalaman bekerja di negara dengan budaya yang berbeda tentu akan membentuk perilaku pegawai menjadi lebih terbuka pola pikirnya dan mampu menerima keanekaragaman. Wawasan pegawai tidak lagi hanya sebatas budaya Indonesia, tetapi juga budaya negara di kawasan Asia Tenggara.

Pegawai akan menikmati suasana budaya negara Asia Tenggara yang sangat kental ketimurannya. Secara umum, bangsa-bangsa Asia Tenggara memiliki keramahan dan kesantunan yang tinggi serta religius. Namun demikian, terdapat perbedaan adat istiadat dan tradisi yang sangat menarik untuk digali dan dipahami. Seni budaya negara-negara Asia Tenggara sangat kaya dan beragam, sehingga akan memperluas cakrawala wawasan

pemegang.

Pegawai juga dituntut untuk berkomunikasi aktif dengan Bahasa Inggris karena harus bekerja di institusi internasional. Keterampilan berbahasa Inggris pegawai akan meningkat signifikan setelah mengikuti program magang. Pegawai harus berinteraksi dengan atasan dan rekan kerja dalam Bahasa Inggris. Pegawai juga wajib membaca literatur, menyusun dokumen, dan menulis laporan dalam Bahasa Inggris.

Pegawai akan memaknai nilai budaya profesionalisme dari institusi internasional. Profesionalisme yang selama ini dipahami dari bekerja di unit asal tentu akan sangat jauh berbeda dengan nilai profesionalisme yang diakui pada institusi internasional. Pegawai akan menjalani proses habituasi nilai budaya profesionalisme selama magang dan diharapkan setelah magang terus menjadi contoh teladan bagi kolega di tempat kerja asalnya.

Program magang ini diharapkan dapat menghasilkan pegawai bertalenta tinggi, mampu berbahasa Inggris dengan baik, dan berwawasan internasional. Pegawai juga diharapkan dapat membentuk karakternya menjadi lebih berpikiran terbuka, toleran, dan mengapresiasi keanekaragaman budaya. Bakat kepemimpinan pegawai juga akan lebih terasah dengan penugasan internasional.

Program magang internasional akan dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Para peserta magang diharapkan dapat menyusun sebuah proyek pada akhir masa magangnya. Proyek tersebut akan dipresentasikan kepada atasannya di tempat asal dan diimplementasikan. Pelajaran yang dipetik (*lesson learnt*) selama magang akan menjadi modal besar untuk implementasi proyeknya. (*)

Perlunya Standar Biaya Khusus (SBK) Kebudayaan

Program pelestarian budaya menimbulkan beragam permasalahan karena tidak memadainya aturan dalam pengamanan pengelolaannya. Cakupan yang meliputi cagar budaya dan nilai budaya benda dan tak benda (*intangible*) yang merupakan warisan budaya memerlukan standar biaya khusus atau pun standar biaya muasukan lainnya.



Oleh: Rahma Haya
(Auditor Madya Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kemendikbud)

Honor untuk praktisi dan jasa profesi, honor seniman, kurator, konservator, dan banyak jenis profesi lainnya penetapan harganya tidak diatur dalam SBM. Belum lagi penanganan pemugaran dan konservasi pada bangunan cagar budaya dan situs yang membutuhkan tenaga arkeolog, tenaga sipil dan arsitektur yang paham arkeologi yang biasanya mereka menyebutnya tenaga tekno arkeo. Kondisi bangunan yang rapuh dan bahan pengganti sejenis yang langka untuk konsolidasi penguatan bangunan juga menjadi masalah. Sumber Daya Manusia untuk jenis kegiatan tertentu seperti analisis pelestarian, ahli konservasi dan pemugaran, ahli cagar budaya bawah air semakin hari semakin berkurang. Banyak juga pegawai yang pensiun atau pun mendapat promosi menduduki jabatan struktural sementara regenerasi tidak bertambah dan belum memadai di samping masih kurangnya alokasi kegiatan diklat teknis kebudayaan di Pusdiklat.

Penanganan jenis kegiatan tidak begitu saja dapat dipahami karena terlalu teknis sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memahami dan beradaptasi. Tidak heran jika pelaksanaan di lapangan memiliki risiko. Risiko pengelola kegiatan, risiko bagi auditor dalam menilai kewajaran penggunaan dana dengan *output* maupun *outcome* adalah hal yang masih sangat jauh. Dalam kegiatan revitalisasi desa adat misalnya, untuk menentukan kemahalan harga tidak begitu saja menghitungnya sesuai dengan harga pasar. Seekor ayam pasar tidak bisa disamakan harganya dengan ayam untuk upacara adat di mana pemilihannya mulai dari pemilihan bibit harus melihat bobot dan bebet melalui pemeliharaan khusus.

Menyimpulkan kemahalan harga untuk bahan bangunan rumah adat menghitungnya dari mana. Selalu ada argumen bahwa ongkos angkut lebih besar dari harga barang. Percaya tidak percaya, datang saja ke Desa Adat di NTT, Nias, Samosir, atau pun Toraja Utara yang

jarak dari kota kecamatan melebihi jarak dari kota provinsi ke kota kabupaten dengan kondisi jalan yang tidak memadai bahkan terkadang harus jalan kaki. Itu mengaudit warisan budaya benda/barang yang kelihatan belum mengaudit warisan budaya tak benda (WBTB) barang yang tidak terlihat.

Mengenali jenis warisan budaya tak benda (WBTB) juga membingungkan. Disebut tak benda tapi benda contoh WBTB adalah keris, perahu pinisi, batik, angklung yang sudah diakui sebagai warisan dunia bukankah barang-barang tersebut terlihat alias merupakan benda lantas mengapa dikatakan tak benda atau namanya kerennya *intangible*. Pada dasarnya, itu adalah benda tetapi filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang menjadikannya *intangible*.

Seperti cagar budaya, warisan budaya tak benda ini juga memiliki peringkat-peringkat mulai dari peringkat kabupaten, provinsi, nasional bahkan peringkat dunia. Setiap tahun ahli WBTB bersidang untuk menetapkan peringkat WBTB ini. Ada pentahapan kegiatan, mulai dari tahap inventarisasi, verifikasi, penilaian, sampai penetapan yang menghabiskan anggaran cukup signifikan.

Warisan budaya tak benda lainnya adalah tarian tradisional, lagu tradisional, karya sastra tradisional, tradisi lisan, dongeng, seni patung, seni ukir, seni pertunjukan, fotografi, film, dan seni yang masih asing yaitu seni media, seni instalasi yang timbul seiring perkembangan teknologi informasi.

Bagaimana cara mengaudit dan menilai kewajaran suatu nilai bila tidak ada standarnya dalam SBM? Ini menjadi masalah yang dihadapi oleh para auditor. Bahkan, tidak ada data dukung dan laporan. Para auditor perlu mengawasi dengan hati dan perlu hati-hati jangan sampai terjadi debat kusir. Dalam kondisi demikian, peran konsultasi sangat dibutuhkan.

Dari penjabaran beberapa masalah tersebut di atas mau tidak mau standar biaya khusus atau pun standar biaya masukan lainnya untuk



Menghitung volume batu dan bahan konservasi di Candi Borobudur (Istimewa)





Pengenalan wayang pada saat *car free day* di depan kantor Kemendikbud (warisan budaya tak benda) (Istimewa)



Perjalanan selama 7 jam mendaki menuju Desa Adat Waerebo dalam audit revitalisasi desa adat. (Istimewa)

bidang kebudayaan harus ada. Bukan hanya pada satker Direktorat Jenderal Kebudayaan tetapi perlu dipikirkan SBK Kebudayaan untuk auditor dalam pelaksanaan di lapangan. Jarak yang jauh dan medan yang sulit membutuhkan biaya khusus yang tidak ada ketentuannya dalam Standar Biaya Masukan (SBM). Demikian pula kompetensi untuk mengaudit bangunan cagar budaya dan situs budaya diperlukan jasa tenaga ahli yang juga tidak ada standar pembiayaannya dalam SBM.

Sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan Standar Biaya Khusus, kondisi yang terjadi pada bidang kebudayaan memenuhi syarat untuk dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi SBK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dilaksanakan secara rutin setiap tahun (bukan



Cek fisik alat *monitoring* pengaturan kelembaban Candi Borobudur. (Istimewa)

- temporer);
2. Mempunyai keluaran (*output*) yang jelas dan terukur;
3. Merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga;
4. Kegiatan yang dimaksud dapat berada di tataran kegiatan, subkegiatan sebagaimana dalam referensi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) maupun detail kegiatannya sepanjang masih berada di bawah program kementerian negara/lembaga dalam rangka pencapaian kinerja kementerian negara/lembaga;
5. Bersifat khusus/spesifik dan hanya dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga tertentu dan atau di wilayah tertentu.

Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diusulkan menjadi SBK adalah sebagai berikut:

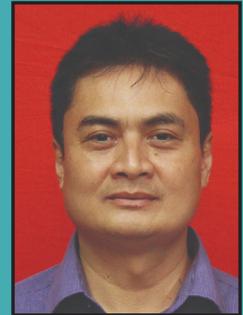
1. Kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang sifatnya umum dalam rangka operasional

perkantoran pada kementerian negara/lembaga, seperti pembayaran gaji, operasional, dan pemeliharaan kantor; dan

2. Kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental, seperti pengadaan komputer dan kendaraan atau pembangunan gedung kantor.

Penyusunan SBM lainnya pada tahun 2017 telah dilakukan oleh Direktorat Kesenian untuk honor seniman, Museum Nasional menyusun SBM lainnya untuk tenaga kurator dan konservator. Namun, masih banyak juga yang belum menyusun SBM lain. Sampai dengan akhir tahun 2018, SBK maupun SBM lainnya untuk bidang kebudayaan belum disetujui oleh Kementerian Keuangan, sedangkan hal tersebut merupakan hal sangat mendesak. Dengan demikian, perlu adanya upaya auditor untuk dapat mendorong untuk terus mengupayakan terealisasinya SBK/SBM tersebut. (*)

Peran Auditor Menghalau Tindak Kejahatan Korupsi



Oleh: R. Saptoadji P. S.H., M.Si.
(Auditor Madya Inspektorat Jenderal
Kemendikbud)

Teori dasar terjadi kejahatan adalah ketika “niat” dan “kesempatan” berselingkuh kemudian melahirkan anak haram berupa “tindak pidana”. Demikian pelajaran di semester pertama bagi mahasiswa yang duduk di hampir semua fakultas hukum di dunia. Pertanyaannya adalah, apa korelasi peran auditor dalam menghalau niat korupsi? Sepotong pertanyaan yang tidak pernah berhenti dari masa ke masa.

Masih maraknya tindak pidana korupsi di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, inefisiensi pelaksanaan APBN/D dan penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu pertanda bahwa peran dan fungsi auditor internal pemerintah belum seluruhnya berjalan secara optimal. Mengapa tidak berjalan optimal? Di sini kita akan menemukan substansi akar masalah yang harus diatasi secara *extraordinary* dan bukan sepotong tindakan biasa.

Berbagai upaya untuk memperkuat peran auditor internal pemerintah sebagai *early warning function* terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Namun, upaya tersebut tampaknya belum memperoleh hasil sesuai dengan harapan. Upaya pemerintah dalam menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pengawasan Internal Pemerintah menjadi Undang-

Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah patut diapresiasi di tengah-tengah upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Kita semua menginginkan sebuah tatanan birokrasi yang amanah untuk mengantarkan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Jika dianalisis lebih lanjut penyebab belum optimalnya peran auditor internal pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Barangkali dapat dipetakan dalam beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut mulai dari independensi dan level kelembagaan, komitmen, serta pemahaman pimpinan tertinggi pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah terhadap pentingnya peran dan fungsi auditor internal. Di samping itu, terbatasnya jumlah auditor internal pemerintah yang bersertifikat dan belum terbangunnya model kompetensi auditor internal pemerintah juga menjadi

masalah. Permasalahan tersebut dalam perspektif yang lain dapat dimaknai sebagai tantangan yang harus diselesaikan oleh profesi bersama pihak-pihak terkait untuk mewujudkan peran auditor internal pemerintah yang semakin berdaya dalam ikut serta membangun *good governance* di Indonesia.

Masalah independensi dan level kelembagaan terlihat dari kedudukan inspektorat jenderal kementerian, inspektorat utama pada Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), dan unit Inspektorat lainnya yang bertanggung jawab langsung terhadap atasannya *in appearance* dianggap tidak independen, walaupun *in fact* barangkali dapat menjaga independensi tersebut. Selain itu, khusus terhadap lembaga inspektorat pada LPNK, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota level eselonnya berada di bawah sekretaris utama, sekretaris provinsi, sekretaris kabupaten/kota ditengarai juga menjadi hambatan psikologis dalam pelaksanaan tugas sebagai auditor internal pemerintah. Hal tersebut juga tidak terlepas dari masih kentalnya budaya timur yaitu perasaan "*ewuh pekewuh*" di lingkungan masyarakat kita, tidak terkecuali di lingkungan birokrasi.

Oleh karena itu, sudah mendesak untuk segera diatur mengenai tata hubungan kerja dan tanggung jawab antara inspektur jenderal/utama dan inspektur lainnya dengan menteri/pimpinan LPNK dan para kepala daerah. Tidak kalah pentingnya adalah langkah penataan eselon jabatan struktural para inspektur untuk mengatasi permasalahan di atas. Kurangnya komitmen dan pemahaman pimpinan eksekutif tertinggi mengenai arti pentingnya pengawasan juga menjadi masalah yang harus dihadapi. Hal ini ditandai dengan belum dimanfaatkannya secara optimal keberadaan lembaga

auditor internal pemerintah di beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Fungsi dan peran auditor internal pemerintah yang semestinya dapat memberikan informasi pertama atau sebagai "mata dan telinga" pimpinan atas terjadinya berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah belum dapat diwujudkan.

Bahkan, dalam kondisi tertentu keberadaannya justru sering tidak maksimal dalam ikut serta mengawal perjalanan pengelolaan pemerintahan. Hal ini bisa jadi karena perbedaan kepentingan dalam memaknai pengawasan internal di satu sisi "untuk melindungi" dan di sisi yang lain "untuk melakukan koreksi" bagi pimpinan. Ini juga tidak terlepas dari proses politik yang tidak sehat dalam pemilihan kepala daerah yang menguras biaya besar.

Masalah lainnya, masih kurangnya jumlah auditor internal pemerintah yang bersertifikat. Menurut data Pusat Pembinaan JFA, sampai dengan saat ini auditor yang bersertifikat baru 7.837 auditor. Dari jumlah tersebut sejumlah 3.329 auditor di antaranya adalah auditor BPKP, 1.869 auditor dari APIP Pusat, dan 2.639 auditor dari APIP pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, dengan jumlah 542 pemerintah daerah yang ada saat ini, secara rata-rata setiap pemerintah daerah hanya mempunyai 4 sampai 5 auditor bersertifikat. Tidak mengherankan jika pelaksanaan audit di lapangan memiliki kualitas hasil audit yang belum memadai. Bahkan, lebih jauh lagi, dalam beberapa pelaksanaan audit di lapangan juga mengikutsertakan pegawai yang tidak mempunyai latar belakang atau pendidikan di bidang audit. Dalam kondisi demikian, penyelesaian atas target jumlah objek audit menjadi prioritas utama

dibandingkan upaya untuk mengejar kualitas hasil audit yang lebih baik. Tugas besar yang sudah menunggu BPKP sebagai pembina jabatan fungsional auditor adalah mendorong seluruh inspektorat jenderal kementerian/inspektorat utama LPNK dan inspektorat pemerintah daerah untuk melakukan sertifikasi seluruh auditornya.

Berikutnya, belum terbangunnya sistem kompetensi di sebagian besar auditor internal pemerintah secara mapan juga masih menjadi masalah. Permasalahan tersebut mencakup definisi kompetensi, standar kompetensi, dan belum diimplementasikannya pengelolaan sumber daya aparatur auditor berbasis kompetensi atau *competency based auditor resources management* (CBARM) di lingkungan auditor internal pemerintah. Definisi kompetensi secara umum masih banyak berkiblat dan diyakini hanya pada tataran *knowledge* dan *skill* atau kompetensi teknis/fungsional semata. Tidak mengherankan jika dalam siklus rekrutmen dan pengembangan pegawai dua hal tersebut yang menjadi fokus perhatian. Perlakuan karena dua hal di atas memang suatu hal yang mudah diketahui secara kasat mata serta mempunyai karakteristik mudah dikembangkan melalui berbagai langkah misalnya pendidikan, pelatihan, dan *job enrichment* atau *enlargement*.

Adapun komponen *attitude* yang merupakan kompetensi perilaku belum mendapatkan perhatian besar dari para pengambil keputusan. Hal tersebut dapat dipahami karena *attitude* yang terdiri dari nilai diri (*value*), ciri diri (karakter), dan motif memang lebih sulit untuk diidentifikasi dan lebih sulit juga untuk dikembangkan secara cepat. Dalam praktik birokrasi sesungguhnya diperlukan keseimbangan antara dua kompetensi (kompetensi

teknis dan kompetensi perilaku) untuk memperoleh profil auditor internal pemerintah dan pimpinan auditor yang tidak hanya sekedar pintar atau terampil dari sisi *knowledge* dan *skill*, tetapi juga mempunyai kecerdasan emosional yang prima untuk melaksanakan tugas di bidang pengawasan.

Jawaban atas permasalahan kompetensi auditor ini adalah perlunya inspektorat jenderal/inspektorat utama dan inspektorat untuk segera menerapkan pengelolaan sumber daya aparatur auditor berbasis kompetensi atau CBARM secara komprehensif. Hal ini berarti dalam pengelolaan sumber daya aparatur auditor mulai dari tahap rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan, *promotion* sampai dengan tahap *retirement* harus benar-benar berpedoman pada bangunan standar kompetensi sebagai *backbone*-nya. Oleh karena itu, *assessment* merupakan keniscayaan untuk mengetahui sejauh mana auditor mempunyai kompetensi teknis dan kompetensi perilaku.

Berbagai masalah serta tantangan di atas sebenarnya hanyalah sebagian permasalahan yang kita hadapi untuk mengoptimalkan peran auditor internal pemerintah dalam rangka mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Faktor-faktor lainnya seperti reformasi di bidang politik, birokrasi dan hukum, serta komitmen bersama beberapa elemen terkait juga memegang kunci penting dalam menentukan arah perubahan yang akan terjadi di masa depan. Namun, untuk menjadi lebih baik, sedapat mungkin lebih proaktif karena di hadapan sudah terbentang permasalahan sekaligus tantangan yang harus diselesaikan bersama. (*)

INTERNAL AUDITOR MENJAWAB TANTANGAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Seorang ekonom Jerman yang juga Direktur Eksekutif *World Economic Forum* (WEF), Prof. Klaus Schwab dalam bukunya "*The Fourth Industrial Revolution*" (2017) mengenalkan konsep Revolusi Industri 4.0. Menurut Schwab, kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah.



Oleh: Dr. Harsono, M.Si.
(Auditor Itjen Kemendikbud)

Ini merupakan tahap keempat dari perjalanan sejarah revolusi industri, revolusi industri pertama ditandai penemuan mesin uap untuk menunjang proses produksi, kedua ditandai dengan ditemukannya energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar, dan ketiga ditandai dengan hadirnya teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia tetapi menggunakan *Programmable Logic Controller (PLC)* atau sistem otomatisasi berbasis komputer.

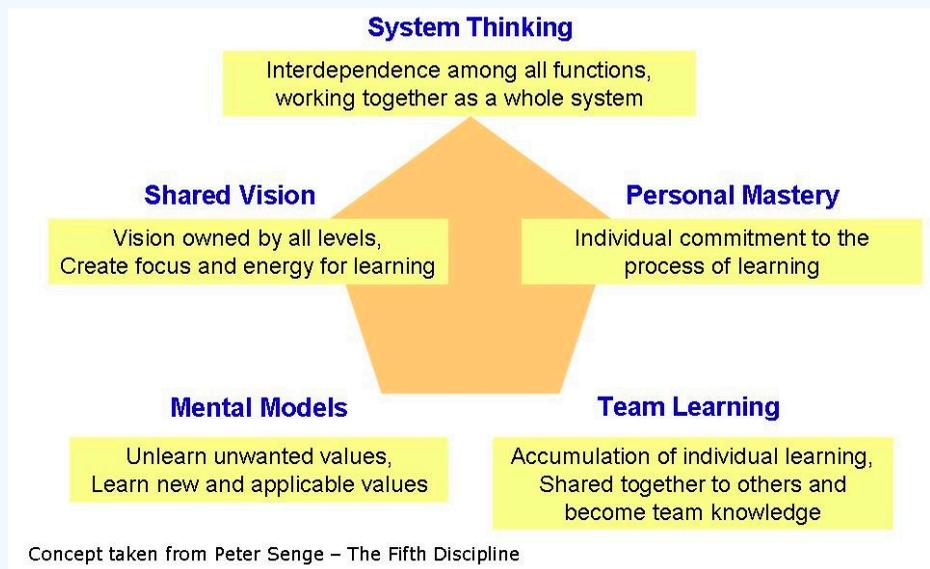
Puncak revolusi industri adalah saat ini, ditandai dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak luas pada kehidupan manusia. Ciri utama era ini adalah otomatisasi di dalam semua proses aktivitas yang berbasis pada teknologi internet yang menghubungkan manusia di seluruh dunia tetapi juga telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan, baik barang maupun jasa. Singkatnya, Revolusi Industri 4.0 telah mendorong inovasi-inovasi teknologi yang memberikan dampak disruptif atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat.

Sebelum tahun 2015, apabila kita hendak berpergian dengan kendaraan umum, baik roda dua (ojek) maupun roda empat sejenis taksi,

kita harus berjalan ke pangkalan atau ke mulut jalan besar untuk menunggu ojek atau taksi yang lewat. Belum lagi harus dilakukan tawar-menawar harga agar tercapai harga yang disepakati. Hari ini, kita menyaksikan hal itu tidak terjadi lagi. Kita hanya butuh *smartphone* dan mengunduh aplikasi ojek *online* untuk dapat melakukan pemesanan kendaraan dari tempat kita. Selanjutnya, kendaraan yang kita pesan akan datang, siap mengantar kita ke tujuan dengan rute dan harga yang sudah disepakati tanpa tawar-menawar.

Tidak hanya jasa transportasi saja yang bisa kita manfaatkan melalui satu aplikasi, tetapi ada jasa pemesanan makanan, pengiriman barang, pembelian pulsa, cuci dan reparasi kendaraan, dan masih banyak jasa lain yang tersedia dari satu penyedia jasa ojek *online*. Ternyata, layanan ojek *online* tidak sebatas sebagai alat transportasi alternatif tetapi juga merambah hingga bisnis layanan antar (*delivery order*). Bisnis lain yang memanfaatkan teknologi internet adalah *online shop* (*e-commerce*). Banyak perusahaan jasa *online* yang menjadi media antara produsen, penjual, dan konsumen. Semua kebutuhan manusia ditawarkan lewat aplikasi belanja *online*, mulai kebutuhan pribadi, rumah tangga, kantor, bangunan, mesin, dan masih banyak yang lain yang semuanya tersedia. Kita hanya perlu menekan tombol-

tombol dalam *smart phone*, barang yang kita pesan akan datang sesuai dengan waktu yang kita harapkan. Hal ini bisa kita lakukan kapan saja sehari 24 jam dan di mana saja, di rumah, kantor, bahkan di perjalanan karena transaksi ini tidak memerlukan tatap muka. Memang dahsyat, teknologi *online* telah membawa perubahan besar terhadap peradaban manusia, dunia usaha, dan dunia industri.



Organisasi Pembelajar

Bukanlah tubuh besar yang membuat makhluk bisa bertahan, tetapi makhluk yang dapat beradaptasi dengan lingkungan itulah yang dapat bertahan menghadapi perubahan. Demikianlah kira-kira hasil penelitian Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusinya. Hukum tersebut nampaknya berlaku juga dalam dunia dunia bisnis, organisasi, dan pemerintahan. Dalam dunia bisnis, kita melihat bagaimana sebuah perusahaan telepon genggam pernah merajai pasar, kemudian perusahaan tersebut akhirnya redup karena kehadiran sebuah *brand* baru yang kini menguasai bisnis telepon genggam.

Dalam lingkup lokal, kita mengenal ada beberapa *supermarket* ternama yang selalu ramai dikunjungi oleh para konsumen. Saat ini, kita lihat *supermarket* tersebut nyaris tutup karena sepi pengunjung. Cara mereka tetap bertahan adalah beradaptasi dengan lingkungan, kemudian membuka toko *online* dengan *brand* yang sama. Contoh lainnya adalah jasa taksi konvensional dan ojek pangkalan yang sempat berjaya beberapa lama. Namun, kini keduanya seakan tergerus oleh kehadiran ojek *online* yang menawarkan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian pada pelanggan. Sebuah perusahaan taksi besar akhirnya harus melakukan adaptasi dengan bergabung dengan salah satu penyedia angkutan *online* dan menjadi salah satu pilihan yang tersedia dalam fitur layanan *online* tersebut.

Pada masa Revolusi Industri 4.0 ini, tidak hanya perusahaan bisnis saja yang dituntut untuk melakukan adaptasi. Sektor publik juga harus melakukan hal yang sama agar bisa terus mengimbangi perubahan dengan tujuan dapat memberikan layanan sesuai dengan tuntutan keadaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan organisasi publik harus siap menghadapi adanya perubahan tersebut. Banyak hal yang harus disiapkan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan menjaga kelangsungan organisasi supaya tetap mampu bersaing dan bertahan. Organisasi yang dapat bersaing harus mengembangkan budaya belajar dan menjadi organisasi pembelajar. Oleh karena itu, lembaga internal auditor seperti Inspektorat Jenderal harus menjadi organisasi pembelajar (*learning organization*).

Secara teori, organisasi pembelajar dipopulerkan oleh Peter Senge lewat bukunya tentang organisasi pembelajar yang berjudul *The Fifth Discipline*. Menurut Senge (1990) organisasi pembelajar adalah organisasi tempat orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, tempat pola baru dan ekspansi pemikiran diasuh, tempat aspirasi kolektif dibebaskan, dan tempat orang terus-menerus belajar melihat bersama-sama secara menyeluruh. Senge memberikan lima saran sebagai sebuah

komponen teknologi mencapai tujuan organisasi pembelajar, yaitu 1) sistem berpikir (*thinking system*); 2) penguasaan pribadi (*personal mastery*); 3) model mental (*mental models*); 4) penjabaran visi (*shared vision*); dan 5) tim belajar (*learning team*). Dengan demikian, organisasi pembelajar dapat diwujudkan secara optimal. Organisasi pembelajar yang optimal dapat memberikan dampak positif terhadap prestasi.

Model Organisasi Pengawasan Penguasaan teknologi informasi.

Teknologi informasi yang semakin mudah terakses hingga ke seluruh pelosok menyebabkan semua orang dapat terhubung didalam sebuah jejaring, bahkan sudah banyak transaksi barang/jasa yang berbasis internet. Organisasi pengawasan ke depan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, penyesuaian tersebut setidaknya meliputi dua hal. Pertama, digitalisasi dan otomatisasi, secara kelembagaan menjadi lembaga yang melakukan digitalisasi dalam aspek tugas tugas dan fungsi. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam hal ini, antara lain pemberian disposisi atau surat/undangan internal bisa dilakukan secara *online* dengan teknologi intranet, penulisan Laporan Hasil Audit, bahkan Laporan Triwulan, Laporan Tahunan semua cukup dalam bentuk digital dan dimuat dalam laman resmi instansi sehingga semua *stakeholder* yang membutuhkan dapat mengakses laporan tersebut. Banyak hal yang bisa diefisienkan bila kita menggunakan teknologi ini, di antaranya waktu dan biaya karena banyak proses dilakukan tanpa kertas (*paperless*).

Kedua, organisasi pengawasan perlu memiliki auditor yang ahli dalam bidang komputer dan pemrograman. Saat ini, banyak sekali aplikasi yang digunakan dalam dunia pemerintahan, misalnya saja proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Ujian Nasional Berbasis Komputer, Pendaftaran Peserta Didik Baru, dan masih banyak aplikasi lain. Sebagai lembaga pengawasan, Itjen harus dapat melakukan audit forensik terhadap semua proses yang terjadi dalam aplikasi tersebut sehingga dapat melakukan penilaian apakah semua sudah berjalan sesuai

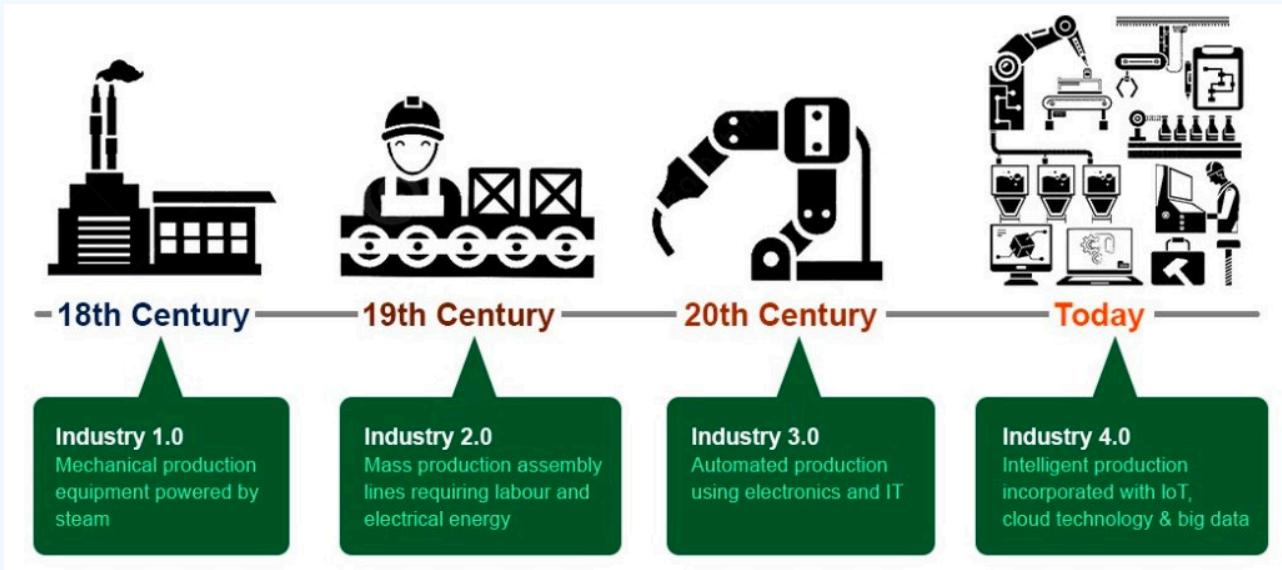
dengan ketentuan yang berlaku. Internal auditor membutuhkan ahli teknologi informasi untuk terus memperbarui sistem aplikasi pengawasan agar auditor dapat melakukan audit digital sehingga dapat mendeteksi penyimpangan/kejahatan berbasis teknologi informasi.

Melek hukum. Saat ini masyarakat kita terus menuju kompleksitas kehidupan, kondisi ini kadang-kadang melahirkan berbagai bentuk kecurangan untuk dapat meraih tujuannya, sebut saja perilaku korupsi saat ini dilakukan dengan banyak cara. Bahkan, belakangan ini kita banyak mendengar tentang kejahatan kerah putih atau *white collar crime*, yaitu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi dan wewenang cukup tinggi pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta sehingga dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Tentu model kejahatan seperti ini dipersiapkan oleh orang-orang yang pandai dan mengerti tentang hukum dengan mempersiapkan skenario kejahatannya.

Menghadapi kondisi demikian, internal auditor membutuhkan ahli hukum untuk membentengi lembaga maupun personal dari jeratan hukum. Hal ini dapat dikatakan mendesak mengingat dunia pengawasan dekat dengan masalah-masalah yang terjadi di organisasi auditan dan pihak ketiga seperti penyedia barang/jasa, masyarakat penerima manfaat, bahkan instansi pemerintah lain seperti di dinas pendidikan.

Sangat mungkin dalam pengungkapan kasus ternyata harus masuk pada ranah penegakan hukum. Dalam kondisi ini auditor harus dapat meyakinkan aparat penegak hukum akan kebenaran temuan auditnya. Tentunya pihak yang diduga melakukan penyimpangan tidak akan tinggal diam, pihak ini akan membuat alibi bahkan pembelaan yang menyatakan bahwa temuan tersebut tidak benar. Bahkan, untuk melakukan ini mereka menggunakan penasehat hukum. Apabila organisasi internal auditor tidak memiliki bekal ilmu hukum yang memadai, bisa jadi mereka akan bebas dari tuduhan atau bahkan akan sangat mungkin mereka menuntut balik.

Responsif. Lembaga internal auditor harus dapat merespons segala perubahan tentang isu-isu khususnya isu di dunia pendidikan mengingat



dunia pendidikan memiliki satuan pendidikan yang sangat banyak, memiliki jutaan peserta didik yang tersebar seantero nusantara, mengelola anggaran yang besar, memiliki para pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak sedikit, serta memiliki *stakeholder* yang luas di kalangan masyarakat. Tentu dinamika di dunia pendidikan sangat tinggi, baik positif maupun negatif. Untuk mengelola itu semua lembaga internal auditor membutuhkan ahli pembuat kebijakan publik (*public policy maker*).

Setidaknya seorang ahli kebijakan publik akan merumuskan usulan kebijakan dengan beberapa dasar di antaranya kebijakan lahir dilakukan melalui proses kajian ilmiah/akademis, kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan kebijakan tersebut dapat menjawab permasalahan yang dihadapi. Banyak kebijakan lahir tidak melalui kajian hukum administrasi negara sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak menyelesaikan masalah tetapi justru menambah masalah baru.

Semua di tangan kita

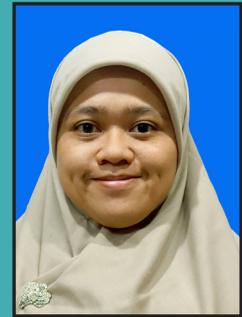
Revolusi industri saat ini memasuki fase keempat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem *online*. Hidup menjadi lebih mudah dan murah. Namun demikian, digitalisasi program juga membawa dampak

negatif. Peran manusia setahap demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat. Hal ini tentu saja akan menambah beban masalah, baik lokal maupun nasional. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, para auditor wajib memiliki kemampuan literasi data, teknologi dan manusia. Literasi data dibutuhkan untuk meningkatkan *skill* dalam mengolah dan menganalisis data untuk kepentingan peningkatan layanan publik dan bisnis. Literasi teknologi menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengolah data dan informasi, sedangkan literasi manusia wajib dikuasai karena menunjukkan elemen *softskill* atau pengembangan karakter individu untuk bisa berkolaborasi, beradaptasi, dan menjadi arif di era “banjir” informasi.

Tanpa terasa, saat ini lembaga pengawasan dihadapkan pada dua pilihan besar yang akan menentukan eksistensinya, yaitu melakukan adaptasi untuk tetap eksis atau puas berdiam diri menunggu hilangnya lembaga pengawasan internal kementerian karena dianggap sudah tidak diperlukan. Tantangan ini perlu dijawab dengan peningkatan kompetensi auditor terutama penguasaan teknologi komputer, keterampilan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama secara kolaboratif, dan kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. (*)

Inspirasi Perubahan Melalui SPAK

Pada tahun 2011, Indonesia termasuk dalam jajaran negara-negara terkorup di dunia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2012 menunjukkan peringkat 118 dari 176 dan IPK tahun 2013 peringkat 114 dari 177 negara. Selain itu, data statistik menunjukkan 93,4% korupsi dilakukan oleh laki-laki. Survei dari Republik Georgia juga menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh perempuan membayar suap sebanyak \pm 5% ketika berhubungan dengan lembaga pemerintah, sedangkan perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh laki-laki membayar suap 11%.



Oleh: Riawati Anggraeni
(Staf Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kemendikbud)

Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) lahir dari keprihatinan hasil survey KPK pada tahun 2012-2013 di daerah Solo dan Yogyakarta. Survey tersebut menunjukkan fakta bahwa hanya 4% orang tua yang mengajarkan kejujuran kepada anaknya. Tentu, sebagai orang tua dan calon orang tua sangat miris mengetahui fakta tersebut.

Perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya tidak diterapkan. Faktanya, masih ada anak yang menyontek, masih ada orang yang menyerobot antrean. Berdasarkan keadaan tersebut, dilakukan analisis, pencegahan seperti apa yang efektif dilakukan untuk meningkatkan penanaman nilai-nilai moral dalam kehidupan sehingga perilaku koruptif dapat dihindari. Jawaban menurut survey KPK, figur seorang ibu dianggap sebagai sosok sentral dalam menanamkan nilai-nilai moral. Seorang wanita, perannya sebagai istri dan ibu cukup besar mempengaruhi kebiasaan dalam keluarga. Dengan latar belakang hasil survey tersebut, bertepatan dengan Hari Kartini, 22 April 2014, KPK meluncurkan gerakan SPAK. Sejak diluncurkan, perempuan-perempuan yang tergabung dalam gerakan ini disebut agen SPAK

dan sampai tahun 2018 ini sudah mencapai jumlah 1.700 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang profesi, seperti polisi wanita, anggota dharma wanita, anggota dewan, bhayangkari, jaksa, hakim, pengacara, ibu rumah tangga, mahasiswi, dan masih banyak lagi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Inspektorat Jenderal Kemendikbud diberi kesempatan melakukan *Training of Trainer* sebagai agen SPAK pada tanggal 13 sampai dengan 15 November 2018. Acara yang berlangsung di Hotel Royal Kuningan Jakarta tersebut dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemendikbud dan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, serta Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mr. Allester Cox. Peserta yang hadir dalam pelatihan tersebut terdiri dari pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemendikbud, termasuk Wida Suryan Muhadjir dan perwakilan pegawai perempuan di lingkungan Kemendikbud. Pelatihan berlangsung selama tiga hari dan dikemas dalam bentuk penyampaian materi tentang tindak pidana korupsi, tanya jawab seputar materi, pengenalan alat bantu SPAK berupa permainan, serta presentasi dan simulasi kasus berupa pentas drama singkat.

Seperti yang disampaikan oleh Basaria, korupsi tidak akan dapat dibasmi hanya dengan penindakan. Kita sering tidak sadar bahwa perilaku kita sehari-hari tergolong perilaku koruptif. Kita masih menganggap lumrah memberikan sesuatu kepada guru agar anak-anak kita mendapat perhatian lebih, memberikan hadiah kepada atasan saat ulang tahunnya, memberikan uang kepada petugas kelurahan untuk pengurusan kependudukan dan masih banyak lagi. Secara ekstrem, kita sudah terbiasa berperilaku koruptif mulai dari dalam kandungan sampai meninggal pun masih ada uang yang harus kita bayarkan untuk mengurus pemakaman. Sungguh ironis, bukan?



Lalu, kita hanya menyalahkan para pelaku tindak pidana korupsi. Padahal, kita ikut andil di dalamnya. Kita ikut memberikan uang/barang yang tidak seharusnya kepada petugas atau pejabat terkait, dan itu kita anggap lumrah.

SPAK menyampaikan edukasi nilai-nilai moral dengan berbagai permainan menarik untuk anak-anak sampai orang dewasa. Permainan yang sudah diluncurkan SPAK sampai saat ini ada enam, yaitu

Semai (Sembilan Nilai). Permainan ini memasang pertanyaan kasus dengan Sembilan nilai antikorupsi agar anak memahami kategori kasus tersebut termasuk nilai kebaikan apa. Dimainkan untuk anak-anak usia Sekolah Dasar mulai kelas 3;

Konsep arisan untuk kalangan dewasa karena kasus-kasus yang menjadi pertanyaan sudah kompleks. Cara bermainnya sama dengan mengocok arisan, jika benar diberi kartu hijau, jawaban kurang diberi warna biru, dan jawaban salah diberi kartu merah.

Majo junior (Lima Jodoh). Sama dengan Semai, Majo junior menjodohkan pertanyaan kasus dengan lima kategori yang sudah ditentukan. Pemain yang mengumpulkan kartu putih dan paling sedikit mengumpulkan kartu merah yang dinyatakan sebagai pemenang.

Majo (Lima Jodoh) untuk usia dewasa, pada prinsipnya sama dengan Majo Junior, hanya tingkat

pertanyaan dan kasusnya lebih luas dan memerlukan pemahaman lebih.

Put Put LK (Putar-putar Lawan Korupsi). Permainan ini menggunakan alat seperti putaran jarum jam dengan dua belas pertanyaan. Pemain yang terkena putaran jarum akan menjawab pertanyaan di dalam kartu tersebut

Sidaka (Korupsi dalam Perkawinan Anak). Merupakan permainan edukasi untuk mengimbau agar tingkat perkawinan anak di Indonesia dapat ditekan. Permainan ini diluncurkan pada tanggal 5 Desember 2018 dalam rangkaian acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2018.

Berbagai cara dan upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi sejatinya dimulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, lingkungan kantor, dan lingkungan masyarakat kita. Jika kita bisa tidak berperilaku koruptif, akan semakin kecil kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Mari kita ikut serta mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Walaupun peran kita kecil tetapi dengan banyaknya agen-agen yang memiliki visi dan misi yang sama, tidak mustahil cita-cita tersebut akan terwujud.

Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan - SPAK

Peran Etik Menjaga dan Mengawasi Perilaku Pejabat Publik*

Oleh: Bagir Manan**

“Tetapi kehadiran suatu moral yang ajeg diperlukan serupa dengan kehadiran pemerintah yang baik demi kesejahteraan masyarakat. Disintegrasi bagi masyarakat lebih sering terjadi karena sebab-sebab dari dalam daripada karena tekanan dari luar. Disintegrasi terjadi ketika tidak ada ketaatan bersama atas moral, dan sejarah menunjukkan longgarnya ikatan moral acap kali menjadi penyebab utama disintegrasi, karena itu masyarakat dibenarkan untuk mengambil langkah yang sama demi menjaga pemerintahan dan berbagai institusi yang penting”. (Sir Patrick Devlin, The Enforcement of Moral).***

Pendahuluan

Etik (etika) sebagai salah satu aturan bertingkah laku, seperti aturan-aturan tingkah laku lainnya (hukum, agama, adat-istiadat), merupakan refleksi historis perjalanan dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, tidaklah berlebihan ungkapan yang menyatakan “Kalau hendak mengenal secara mendalam dan ingin memperbaharui/mengubah suatu masyarakat, kenalilah sejarah dan budaya masyarakat yang bersangkutan.” Sejarah dan budaya ini tidak hanya terbatas pada kenyataan-kenyataan. Tidak kalah penting adalah tata nilai, keyakinan, dan kesadaran yang hidup dalam masyarakat, seperti tata nilai etik.

Secara etimologis, etik (*ethic*: Inggris, *etique*: Perancis, *ethiek*: Belanda) berasal dari bahasa Yunani “*etos*” yang memuat kandungan ‘karakter (*character*), sikap (*disposition*), dan pembawaan (*nature*).¹ Selain itu, ada kata “moral” dari bahasa Latin “*mores*”. Ada yang membedakan antara “etik” dan “moral”, tetapi

ada yang menganggap keduanya mengandung makna yang sama. Dalam bahasa Indonesia, dikenal juga kata “kesusilaan” atau “susila” dan “akhlak”, yang memuat kandungan yang sama dengan “etik”. Biasanya, kata “kesusilaan” atau “susila” dipadankan dengan “*zede/zeden*” (Belanda) yang lazim juga dipadankan dengan “etik”, sedangkan “akhlak” berasal dari bahasa Arab, seperti “*akhlakul karimah*”.

Etik sebagai “Pedoman” Tingkah Laku

Ada semacam upaya untuk lebih menjelaskan perbedaan antara “hukum” dan “etik” dengan menggunakan ungkapan yang berbeda. Etik dipertalikan sebagai “pedoman” atau “petunjuk” yang menunjukkan sifat individual, dan tidak ada paksaan eksternal terhadap ketaatan atas etik. Hukum lazim disebut “aturan” yang menunjukkan unsur dapat memaksa dan dipaksakan dari luar. Biasanya, untuk menggabungkan etik dan hukum yang sama-sama memuat kandungan “semestinya bertingkah laku” (*ought to be*), dipergunakan istilah “ketentuan” atau “*rules*” (seperti “*rules of behavior*”).

1 Stephen J.A. Ward, *Ethics and Media: An Introduction*, hlm. 8.

* Disampaikan pada Seminar Nasional MKD-DPR. RI, di Jakarta, 8 Oktober 2018.

** Guru Besar Tidak Tetap FH UNPAD. Ketua Mahkamah Agung RI (2001-2008), Ketua Dewan Pers (2011-2013, 2013-2016).

*** Charles G. Howard – Robert S. Summers, *Law its nature, functions, and limits*, Englewood Cliffs New Jersey: 1965, hlm. 421.

Pada bagian lain catatan ini akan diuraikan juga perbedaan antara etik dan hukum, antara lain etik merupakan kewajiban individual dan berlaku ke dalam, sedangkan hukum merupakan kewajiban sosial dan berlaku ke luar. Namun, ada juga yang menggambarkan etik berlaku ke dalam dan keluar. Atau paling tidak, tingkah laku internal etik akan selalu ada refleksi keluar.

"Etymology ... suggests that ethics is both individualistic and social. It is individualistic because individuals are asked to make certain values part of their character and to use certain norms in making decisions. It is social because ethics is not about every person formulating their own rules of behavior apart from others. Correct conduct is honoring rules of fair social interaction – rules that apply to humans in general or to all members of a group. We experience ethics internally as the tug of conscience. We experience ethics externally as the demands placed upon us by code of ethics, back by social sanction. Psychologically, one learns ethics as a set of responses shaped by social enculturation and the ethical "climate" of society. My ethical capacities are nurtured and exercised within groups. Also, ethics requires that I adopt a social perspective that looks to the common good and transcends selfish individualism. Ethically speaking, "how ought I to live?" Cannot be asked in isolation from the question, "how ought we to live?"²

(secara etimologi/ilmu bahasa, ... menyatakan bahwa etik sekaligus bersifat individualistik dan sosial. Individualistik karena etik menuntut para individu menjalankan nilai-nilai tertentu yang menunjukkan karakter mereka dan mengikuti norma-norma tertentu dalam membuat keputusan. Bersifat sosial karena etik tidaklah menyangkut bahwa setiap orang dapat membuat aturan sendiri-sendiri terlepas dari orang lain. Tingkah laku yang benar adalah penghormatan atas aturan-aturan dalam interaksi sosial secara benar atau jujur, aturan-aturan yang diterapkan pada setiap orang pada umumnya atau pada semua anggota kelompok. Secara internal, kita menjalankan etik sebagai tali penarik (petunjuk) kata-hati (kesadaran). Sebagai tuntutan yang dibebankan di pundak kita adalah "kode etik" (*codes of ethics*), yang dikuatkan

² *Ibid*, hlm, 8-9.

dengan sanksi sosial. Secara psikologis, seseorang mempelajari etik sebagai suatu kumpulan respons yang dibentuk oleh akulturasi sosial dan suasana (*climate*) etik masyarakat. Kapasitas etik saya terpelihara dan berjalan dalam kelompok. Etik juga menuntut agar saya mengambil (mengadopsi) pandangan (perspektif) masyarakat yang menunjukkan kebaikan bersama di atas individualisme diri sendiri. Berbicara secara etis "bagaimana semestinya/sebaiknya saya hidup?" tidaklah dapat dipisahkan dari pertanyaan: "Bagaimana semestinya kita hidup?"

Etik dan Hukum

Terlepas dari diskursus teoritis atau filosofis "pemahaman praktis" hubungan antara etik dan hukum, di bawah ini akan dicatat yang membedakan antara hukum dan etika (moral). Van Apeldoorn³ mencoba merinci perbedaan-perbedaan tersebut, antara lain:

- (1) Dilihat dari segi isi, hukum dimaksudkan sebagai tatanan yang mengatur kehidupan bersama atau masyarakat (*goode ordering der samenleving*). Etika atau moral bertujuan untuk kesempurnaan pribadi (*volmaking van de enkele mens*). Namun, perlu disadari, kesempurnaan kehidupan pribadi akan mempengaruhi peri kehidupan masyarakat. Perbaikan peri kehidupan pribadi akan membantu (mendorong) perbaikan tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik (*verbetering van de mens meerwerk tot een betere maatschappelijkorde*).
- (2) Dilihat dari sumber atau asal-usul, Immanuel Kant menyatakan etika atau moral bersifat otonom, artinya bersumber dari kesadaran sendiri (*eigen geweten*). Ketentuan hukum bersifat heteronom, artinya bersumber (berasal) dari suatu kekuasaan di luar diri pribadi (*uitwending macht*).
- (3) Dilihat dari cara menjamin ketaatan, ketaatan pada etik atau moral bersumber dari kesadaran (dan kemauan) pribadi. Tidak ada kekuasaan (kekuatan) luar yang memaksa ketaatan pada etik atau moral (*De moraal wortelt in de geweten van de mens. Hier is dan ook geen uitwendig macht die dwingt tot naleving de morele geboden*). Berbeda dengan hukum, ada

³ *Apeldoorn, Inleiding to de studie van het Nederlandse recht*.

kekuatan di luar kehendak pribadi, yaitu negara yang menjaga, bahkan dapat memaksakan ketaatan pada hukum. Namun, seperti telah dicatat di atas, ketaatan pada etika atau moral besar sekali pengaruhnya pada ketaatan pada hukum. Seseorang tidak melakukan perbuatan pidana (mencuri, korupsi, dan lain-lain) tidak selalu karena takut dipidana, tetapi kesadaran etik atau moral merupakan sarana pencegahan untuk melakukan pelanggaran hukum. Ketaatan pada etik atau moral (termasuk ketaatan pada agama dan kesusilaan) adalah pendorong kuat menuju “masyarakat taat pada hukum (*law abiding society*)”.

Van Apeldoorn mencatat pula unsur-unsur lain yang membedakan antara hukum dan etika atau moral, yaitu yang berkaitan dengan tata laksana (*de werking*) dan tujuan (*het doel*). Akan tetapi, dilihat dari tantangan yang sedang kita hadapi, tiga unsur yang dicatat di atas, sangat penting untuk mendapat perhatian.

Pertama, perlu disadari, etika atau moral merupakan kebutuhan pribadi dan tuntutan terhadap pribadi. Kuat atau lemahnya sikap dan ketaatan pada etik atau moral sepenuhnya tergantung pada tingkat kesadaran dan tanggung jawab pribadi (mempribadi).

Kedua, terdapat “hubungan fungsional” antara ketaatan pada etika atau moral dengan ketaatan pada hukum. Makin tinggi ketaatan pada etika dan moral, makin tinggi pula ketaatan pada hukum. Kita sering mendengar ungkapan “berbagai pelanggaran hukum (seperti korupsi) tidak terlepas dari melemahnya, bahkan krisis etik atau moral”.

Ketiga, tingkat ketaatan pada etik atau moral ditentukan oleh tingkat kesadaran pribadi (*geweten van de mens*). Kesadaran (*geweten*) terhadap etik atau moral berkaitan dengan budaya dan peradaban (*culture and civilization*). Kita pernah mengenal ajaran Hobbes mengenai keadaan masyarakat alamiah (*state of nature*). Hobbes menyatakan, dalam masyarakat alamiah akan senantiasa terjadi “*bellum omnium contra omnes – all against all*”. Artinya, setiap orang merupakan serigala bagi orang lain. Selain mencerminkan rendahnya budaya, keadaan itu merupakan gambaran peradaban sebelum ada negara. Ajaran Hobbes berbanding terbalik dengan pandangan Locke yang menggambarkan “*state of nature*” merupakan peri

kehidupan yang damai, meskipun diakui keadaan surgawi itu senantiasa mengandung ancaman untuk “bertikai” karena perbedaan kepentingan dan keberpihakan pada kelompok masing-masing.

Keempat, kesadaran (*geweten*) pribadi itu tidak terlepas dari sifat arif atau kearifan (*wisdom, wijsheid*). Ketaatan pada etik atau moral selain sebagai cermin budaya dan peradaban, juga cermin kearifan.

Persoalannya, setiap orang sekaligus sebagai makhluk individu dan anggota masyarakat. Kita pernah menerima pelajaran (ketika mahasiswa) yang berasal dari Pitirim Sorokin yang berbunyi: “*Situation gebundenheit*” (keadaan lingkungan itu yang menentukan). Manusia ditentukan oleh lingkungan-lingkungan tertentu, tidak hanya fisik tetapi juga lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Termasuk juga pengaruh konsep atau teori.

Ada beberapa kemungkinan mengenai hubungan antara individu dengan lingkungan. **Pertama**, tunduk, patuh pada semua keadaan dan kehendak lingkungan. **Kedua**, berusaha memperoleh sebesar-besarnya manfaat (memanfaatkan) dari lingkungan, seperti memanfaatkan demokrasi untuk berkuasa, memanfaatkan birokrasi untuk memperkaya diri sendiri). **Ketiga**, berusaha mengubah lingkungan, baik dalam makna membangun lingkungan yang lebih baik atau merusak lingkungan, seperti mengubah suatu lingkungan tertutup menjadi lebih terbuka (demokratis) atau mengubah demokrasi menjadi otoriter. Bukankah Wali dan Rasul diutus untuk melakukan perubahan?

Bermacam-macam corak hubungan itu akan menentukan nilai etik atau moral individu maupun masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, etika atau moral berjarak dengan hal-hal seperti “*to do the best for the public*” atau “*displays virtue*” atau “*honesty*”, atau “*integrity*” karena yang ada hanyalah “*selfishness*”.

Dari kaca mata kehidupan berbangsa dan bernegara, keadaan yang digambarkan di atas dapat memicu pertanyaan: “Apakah keadaan yang semacam itu semata-mata refleksi dari sikap individual atau ada kesalahan institusional, seperti pengaruh atau akibat tatanan dasar bernegara, tatanan kekuasaan bernegara, tatanan susunan organisasi negara, dan lain sebagainya.

Seandainya dugaan-dugaan di atas benar, tidaklah cukup (meskipun penting) untuk menata etik atau moral masyarakat, tetapi apakah tidak semestinya secara mendasar menata sistem penyelenggaraan negara yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik pada lembaga-lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan.

Ukuran (Mengatur) Pelaksanaan Etik

Jonathan Herring mengutarakan tiga pendekatan dalam memecahkan persoalan etik:⁴

- 1) Pendekatan atas dasar "*Rules based Approaches*"
Berdasarkan pendekatan ini, jawaban etik atas suatu persoalan adalah *follow the rules*. Sejauh mana etik ditegakkan, ditentukan oleh ketaatan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Bagi kita, persoalannya, *rule* atau *rules* macam apakah yang diikuti itu? Dalam kaitan ini, mungkin kita dapat merenungkan potongan tembang puisi Emha Ainun Nadjib yang berbunyi: "*Kita telah memboroskan anugerah Tuhan ini melalui cocok tanam ketidakadilan dan panen kerakusan*".
Bagaimana kalau *rules* yang dibuat itu justru *rules* yang tidak berkeadilan. *Rules* yang hanya memberi peluang pada sekelompok kecil, jauh dari *rules* yang akan menjamin perwujudan keadilan sosial, kesejahteraan sosial, atau sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat? *Rules* yang menimbulkan kontradiksi-kontradiksi. Orang yang bercocok tanam justru lebih susah daripada perantara. Orang yang panen lebih susah daripada para pengepul. Sekedar ilustrasi, semua sepakat bahwa korupsi dan terorisme harus dilawan dan diberantas. Tidak hanya oleh aparat keamanan dan pertahanan, tetapi juga oleh setiap warga. Namun, kita berdebat mengenai tata cara melaksanakannya. Dalam korupsi ada perdebatan mengenai luas-sempit wewenang KPK. Dalam hal memberantas terorisme, kita berdebat mengenai peran TNI. Sadar atau tidak sadar, perdebatan mengenai tata cara, instrumen pelaksanaan, justru mengakibatkan *reducing* atau *reducing* terhadap kesepakatan atau kemestian

memberantas korupsi atau memberantas terorisme. Tata cara memang penting, tetapi kita harus jauh dari "tujuan menghalalkan segala cara". Tidak semestinya tata cara mengorbankan objektif yang mesti dicapai. Kita dihadapkan pada kenyataan, berbagai *rules* dibuat untuk melaksanakan kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat banyak. Pertanyaannya, "etiskah mengikuti atau taat pada *rules* dan pelaksanaan *rules* semacam itu?" Seandainya "panen" itu diberi makna melaksanakan dan atau menegakkan hukum Apakah pelaksanaan dan penegakan hukum telah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, prinsip sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat banyak? Akibat *rules* yang tidak bertalian dengan kepentingan rakyat banyak, pelaksanaan dan penegakan hukum berada di bawah standar harapan masyarakat, baik dalam makna berlebihan (*excessive*) maupun terlalu ringan. Kenyataan ini dapat bersumber dari "*rules*" atau "pelaksana/penegak hukum".

Pendekatan ini bertalian dengan pendekatan konsekuensialisme (*consequentialism*). Ukuran etis atau tidak etis ditentukan oleh konsekuensi. Suatu tindakan (atau tidak bertindak) akan dipandang etis apabila mempunyai konsekuensi baik. Suatu tindakan (atau tidak bertindak) dianggap salah secara etik apabila menimbulkan konsekuensi buruk. Pendekatan konsekuensialisme ini dapat menimbulkan penolakan terhadap pendekatan *follow the rules or not follow the rules*. Menurut *rules* dilarang berbohong, tetapi apabila dalam keadaan (situasi) tertentu berbohong justru untuk atau mempunyai akibat lebih baik daripada keburukan, berbohong tidak melanggar etika. Yang perlu dipertimbangkan, konsekuensialisme semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian. Bagaimana kalau bertindak (atau tidak bertindak) sekaligus mempunyai akibat baik dan buruk? Dalam hal seperti ini, mesti dilihat konsekuensi secara menyeluruh, bukan sekadar terhadap keadaan tertentu.

- 2) Pendekatan atas dasar "*Outcome based Approaches*"
Menurut pendekatan ini, jawaban etik atas suatu persoalan ditentukan oleh *produce the*

⁴ Jonathan Herring, *Legal Ethics*, 1913.

best outcome atau menghasilkan yang terbaik. Lagi- lagi persoalannya, terbaik untuk siapa? Semestinya terbaik menurut prinsip-prinsip umum yang diakui (*recognized general principles*), misalnya, tatanan demokrasi yang bertanggung jawab, yaitu demokrasi yang berkeadilan (sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum), sesuai dengan rasa keadilan (*general principles of justice*), dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat banyak. Di lingkungan pers, saya sering menyebutkan prinsip melakukan yang terbaik dan (untuk) menghasilkan yang terbaik itu bertalian dengan integritas (*integrity*). Integritas merupakan salah satu *requirement ethics* yang semestinya tidak dapat ditawar.

- (3) Pendekatan atas dasar *Character based Approaches*
Menurut dasar ini, akar etik ditunjukkan oleh *act in a way that displays virtue*, yaitu perbuatan yang (senantiasa) dilandasi dan didasarkan pada kebajikan, yang antara lain berupa *honesty* (kejujuran) atau *kindness* (kebaikan). Prinsip *honesty* dan *kindness* tidak dapat dipisahkan dari *integrity* (integritas). Agar berbuat dengan cara yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik, senantiasa diperlukan *honesty, kindness, fairness, impartiality, dan sense of justice*. Pendekatan kebajikan (*virtue*) dapat ditelusuri dari ajaran etik Socrates dan Aristoteles. Bukanlah konsekuensi yang menentukan suatu perbuatan benar secara etik atau secara moral, melainkan motif dari suatu perbuatan, yaitu untuk berbuat kebajikan.⁵
- (4) Pendekatan atas dasar "*Deontology Approaches*"
Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dipandang etis, bukan dilihat dari hasil atau konsekuensi perbuatan tersebut (baik atau buruk), melainkan perbuatan itu sendiri yang menjadi ukuran etis atau tidak etis. Berbohong adalah perbuatan tidak baik karena itu tidak etis. Menceritakan atau menyampaikan sesuatu yang benar (kebenaran) adalah sesuatu yang baik. Dengan demikian, menceritakan kebenaran merupakan suatu tindakan etis. Mungkin dalam situasi tertentu, menceritakan benar (kebenaran) terasa pahit

atau menyakitkan, tetapi sekali-kali tidak menjadi pembenaran untuk berbohong.⁶

Etika Pejabat Publik

Pejabat publik adalah setiap orang yang dipilih atau diangkat atau mendapat tugas memangku dan menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan. Dalam bahasa yang acap kali diperdengarkan, pejabat publik adalah setiap orang yang duduk dalam lembaga kenegaraan atau pemerintahan untuk menjalankan amanat rakyat. Bahkan, di masa Orde Lama dan Orde Baru, kita mengenal ungkapan amanat penderitaan rakyat, khususnya penderitaan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Pada hari-hari ini (bagi mereka yang mau melihat), berbagai penderitaan itu masih merupakan pemandangan yang dapat dijumpai pada setiap tempat (di kota, di desa, di pantai dan di gunung serta wilayah-wilayah terpencil lainnya).

Di masa lalu, terutama di masa Orde Lama, ungkapan "penderitaan rakyat" merupakan sambungan peninggalan kolonial dan menguatnya kembali bentuk-bentuk yang disebut neo kolonialisme dan neo imperialisisme. Pada saat ini, setelah lebih dari 70 tahun merdeka, masih layakkah dikatakan segala penderitaan itu (kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan), adalah peninggalan kolonialisme, akibat atau ulah neo kolonialisme atau neo imperialism? Semestinya, tidak! Sudah saatnya menyadari, penderitaan rakyat, ungkapan-ungkapan tujuan kemerdekaan, hanya sekedar jargon. Berbagai tatanan yang dijalankan sebenarnya bukan hanya jauh, tetapi menjauh dari berbagai kemestian yang di satu pihak harus ditiadakan dan di pihak lain harus menjadi lebih baik.

Pada saat ini, sebagian para elit di bidang politik, sosial, agama, bahkan di kalangan keilmuan, termasuk pers, tidak jemu-jemunya menyinyalir "ancaman nyata" perpecahan bangsa dan negara, menguatnya pilihan dasar-dasar dan ideologi yang bukan Pancasila, tatanan kenegaraan di luar sistem UUD 1945, dan ancaman lain-lain.

Menghadapi berbagai sinyalemen itu, ada berbagai pertanyaan. **Pertama**, sejauh mana ancaman

⁵ *Ibid*, hlm 25.

⁶ *Ibid*, hlm 12-13

itu begitu kuat sehingga telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi yang diutarakan di atas? Apakah tidak mungkin, ancaman nyata itu nampak kuat bukan karena mereka benar-benar kuat, melainkan karena kita lemah? Bahkan, setiap hari melemahkan diri dalam semua aspek kehidupan bernegara dan berbangsa dalam bentuk kelemahan tatanan politik, kelemahan tatanan ekonomi, kelemahan tatanan sosial, dan kelemahan lain-lain.

Kedua, sejauh mana rakyat banyak menjadi bagian atau memperhatikan ancaman tersebut? Hingga saat ini, rakyat banyak tidak atau belum menjadi ancaman berbagai sendi kenegaraan dan kebangsaan kita. Justru para elit dan pers yang dilekati berbagai motif dan kepentingan tidak habis-habisnya melakukan *exaggerated* berbagai ancaman tersebut. Rakyat tidak atau belum tersentuh oleh "ancaman" itu. Bagi rakyat, ada berbagai perasaan lain yang dihadapi. Rakyat makin merasakan ada jarak yang makin lebar antara pimpinan dan rakyat. Dalam praktik, yang dipertontonkan oleh para pemimpin bukan prinsip *the best to the public*, bukan *displays virtue*, bukan *honesty*, bukan *integrity* demi kepentingan rakyat banyak, melainkan berbagai tingkah laku sebagai upaya memperkokoh porsi pembagian kekuasaan, memperkuat porsi *privilege* sebagai penikmat kekuasaan. Yang disaksikan dan dirasakan rakyat adalah ketidakadilan. Mengulangi ungkapan Emha Ainun Nadjib, yang disebut bercocok tanam (pembangunan) adalah bercocok tanam ketidakadilan. Yang disebut panen (pembangunan) adalah panen kerakusan. Kesenjangan makin nyata. Rakyat merasa mereka tetap, bahkan mungkin makin miskin dan terbelakang, tetapi di pihak lain, sebagian dari jumlah yang sangat kecil menikmati segala *privilege* dan kemewahan.

Tanpa mengurangi ketegasan penyelenggara negara dan pemerintah untuk "menggebuk" gerakan ideologis (bukan sekadar penawanan pikiran dan pendapat), sangat perlu mempertimbangkan berbagai keprihatinan dalam dimensi yang tidak semata-mata ideologis. Tidakkah sangat penting menemukan berbagai sebab ancaman itu pada faktor-faktor non ideologis seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, merasa terpinggirkan di satu pihak, berhadapan dengan pelaksanaan pengelolaan

negara, pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain yang tidak mendekati pada tujuan berbangsa dan bernegara di pihak lain. Perlu pemikiran ulang untuk melakukan koreksi yang mendasar terhadap tingkah laku politik dan birokrasi yang menjalankan negara dan pemerintahan sebagai cara membangun etika pejabat publik yang bertanggung jawab.

Bagaimana bentuk-bentuk norma etika pejabat publik yang dapat menjadi penangkal ancaman terhadap dasar-dasar dan eksistensi negara dan bangsa kita? Selain penerapan pendekatan-pendekatan yang diutarakan Jonathan Herring (supra), perlu pula diperhatikan "*Nolan Rapport Committee*" mengenai "*Standards in Public Life*" (London, 1995).

Komisi Nolan merumuskan *The Seven Principles of Public Life* yaitu:

(1) Selflessness

Holders of public office should take decisions solely in terms of the public interest. They should not do so in order to gain financial or other benefits for themselves or their family.

(Pejabat publik membuat keputusan semata-mata untuk kepentingan publik. Pejabat publik tidak boleh membuat keputusan untuk memperoleh keuntungan finansial bagi diri atau keluarganya.)

(2) Integrity

Holders of public office should not place themselves under financial or other obligation to outside individuals or organizations that might influence them in the performance of their official duties.

(Pejabat publik tidak boleh atau dilarang berada di bawah pengaruh uang atau kewajiban-kewajiban lain, baik dari orang-orang atau badan-badan lain yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas-tugas resminya.)

(3) Objectivity

In carrying out public business, including making public appointments, awarding contracts, or recommending individuals for rewards and benefits, holders of public office should make choices on merit.

(Dalam melaksanakan pekerjaan publik, termasuk pengangkatan pada jabatan publik, membuat kontrak (perjanjian kerja), atau memberi rekomendasi agar orang-orang mendapatkan

penghargaan atau suatu keuntungan, pejabat publik bertindak semata-mata atas dasar dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan.)

(4) Accountability

Holders of public office are accountable for their decisions and actions to the public and must submit themselves to whatever scrutiny is appropriate to their office.

(Pejabat publik bertanggungjawab atau akuntabel kepada publik atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dan senantiasa bersedia untuk diteliti.)

(5) Openness

Holders of public office should be as open as possible about all the decisions and actions that they take. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands it.

(Pejabat publik sejauh mungkin harus terbuka atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Mereka harus memberikan alasan-alasan atas setiap keputusan dan pembatasan penjelasan hanya dalam hal kepentingan publik yang lebih luas (lebih besar) menghendaki.)

(6) Honesty

Holders of public office have a duty to declare any private interests relating to their public duties and to take steps to resolve any conflicts arising in a way that protects the public interest.

(Pejabat publik berkewajiban menjelaskan atau menyatakan setiap kepentingan pribadi yang berkaitan dengan tugas-tugas publiknya dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik kepentingan (antara kepentingan pribadi dan tugas-tugas publik), untuk melindungi kepentingan publik.)

(7) Leadership

Holders of public office should promote and support these principles by leadership and example.

(Pejabat publik berkewajiban memajukan dan mendukung berbagai asas di atas melalui (dengan menunjukkan) kepemimpinan dan keteladanan.)

Kebutuhan Etik bagi Pejabat Publik

Sebelum secara khusus mencatat kebutuhan atau hubungan etik dengan pejabat publik, perlu dipahami, etik sebagai pedoman atau aturan tingkah laku ada pada setiap segmen baik dalam tatanan individual, sosial, politik, dan lain-lain. Kita mengenal kode etik pers, kode etik advokat, kode etik dokter, kode etik hakim, kode etik perwira, termasuk kode etik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan (pejabat publik).

Ada beberapa landasan yang mendasari kebutuhan etik pejabat publik.

Pertama, tatanan negara berdasarkan hukum.

Paling tidak, dalam makna formal (*rechtsstaat in formele zin*), negara hukum adalah negara yang dijalankan atas dasar supremasi hukum (*supremacy of law*) yang mengandung beberapa makna. (a) Semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*); (b) pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum (*government under the rule of law*); (c) persamaan di depan hukum akan senantiasa disertai kebebasan (*liberty*); (d) kebebasan dan persamaan menuntut jaminan dan perlindungan hak-hak dasar (hak asasi) manusia. Dalam tingkat lebih lanjut, jaminan dan perlindungan hak-hak dasar tidak hanya terbatas pada hak-hak pribadi dan politik (*individual/civil and political rights*), tetapi juga hak asasi sosial (*social justice*), termasuk jaminan dan perlindungan hak kelompok (*community rights*), baik politik maupun sosial

Apakah masih perlu etik dalam negara berdasarkan hukum? Tetap perlu. Mengapa? Prinsip persamaan dalam hukum, di satu pihak untuk mencegah pelanggaran hukum yang hanya menguntungkan satu kelompok orang atau seseorang. Namun, di pihak lain, persamaan di depan hukum yang menafikan kenyataan ada perbedaan (seperti perbedaan atas dasar ekonomi atau sosial) dapat juga menimbulkan ketidakadilan bahkan penindasan. Hukum menjadi alat eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Etik dapat menjadi salah satu sarana menjamin prinsip persamaan di depan hukum yang adil dan wajar.

Pejabat publik selain harus bekerja berdasarkan hukum, juga—baik langsung maupun tidak langsung—melaksanakan hukum, baik dalam memberi pelayanan hukum atau menerapkan hukum (*law applying*), dan menegakkan hukum (*law enforcement*). Dalam konteks

yang diperluas, pejabat publik dalam melaksanakan hukum, memberi pelayanan hukum, dan atau penegakan hukum, tidak semestinya hanya sekadar sebagai mulut hukum *cq* mulut undang-undang (*the mouth of the laws*), melainkan mulut keadilan (*justice*). Di sini, etik berperan untuk menunjukkan pertanggungjawaban untuk menentukan bagaimana semestinya hukum itu diterapkan atau ditegakkan demi mewujudkan keadilan bersama (*common justice*) atau kebaikan bersama (*common good*).

Kedua, tuntutan demokrasi. Banyak sebutan tentang demokrasi: demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi atas dasar permusyawaratan (*deliberate democracy*), demokrasi proletar, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan lain-lain. Tidak satu pun dari berbagai jenis demokrasi yang dapat mengklaim paling benar atau paling tepat menggambarkan apa sebenarnya demokrasi.

Untuk menghindari salah pengertian dan menemukan deskripsi yang mudah, catatan ini mengartikan demokrasi yang dipergunakan Abraham Lincoln (dikenal dengan sebutan *Gettysburg speech*, 1863) yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*),⁷ atau yang oleh John Keane disebut: *government of the humble, by the humble, for the humble* (pemerintahan (yang berasal) dari orang biasa, oleh orang biasa, dan untuk orang biasa) yaitu pemerintahan sendiri diantara orang-orang yang sama derajat (*self government among the common people*) dengan mekanisme demokrasi perwakilan.⁸

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, demokrasi mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik (*responsible government to the public*) dalam bentuk pertanggungjawaban publik dan hukum.

Secara hukum, demokrasi menjamin kebebasan. Akan bertentangan dengan etik demokrasi apabila kebebasan itu membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Namun, akan bertentangan dengan etik jika seorang pejabat publik di daerah mengklaim 90% atau 70% rakyat daerah akan memilih calon

tertentu. Bukan saja tidak etis, pernyataan semacam itu dapat mendorong mobilisasi, bukan partisipasi dalam pemilihan. Sebuah RUU telah disetujui menjadi undang-undang. Dalam waktu beberapa hari setelah menjadi undang-undang, dikeluarkan Perpu yang mengubah beberapa pasal. Mungkin Perpu itu secara format tidak bertentangan dengan hukum, tetapi etiskah secara sepihak (menggunakan Perpu) mengubah undang-undang hasil persetujuan bersama dan baru disahkan beberapa hari?

Dalam berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat publik seperti anggota DPR, diawali dari kurangnya kehendak menjunjung tinggi etik. Meskipun secara teoritikal kekuasaan DPR (di bidang legislatif, anggaran, pengawasan) secara hukum pada dasarnya tidak terbatas, tetapi secara etik DPR dapat membatasi diri untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau tidak melakukan hal ikhwal yang layak dibiarkan dijalankan oleh eksekutif.

Ketiga, sarana kendali atas diskresi. Semua penyelenggara dan pemerintahan senantiasa dilekati wewenang atas dasar diskresi (*beleid*), yaitu kebebasan melakukan tindakan (*Freis Ermessen*) untuk mencapai atau memecahkan masalah tertentu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur oleh hukum. Dalam dunia ilmu hukum administrasi, diskresi lebih mengedepankan tujuan (*doelmatigheid, purposeful*). Namun, tidak berarti diskresi dapat dilakukan bertentangan atau melawan hukum. Diskresi hanya dapat dilakukan pejabat yang berwenang untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan hukum.

Untuk lebih menjamin prinsip-prinsip hukum di atas, kendali etik atas penggunaan diskresi yang memberi kebebasan bertindak (*Freis Ermessen*) sangat penting. Prof. Peter H. Schuck menyatakan berbagai kebaikan diskresi, tetapi ada juga sisi buruk diskresi.⁹ Menurut Schuck, diskresi dapat menjadi sumber kegaduhan penyelenggaraan administrasi negara, membuka peluang bertindak berlebihan, tujuan tidak jelas, dapat berlaku tiranis terhadap rakyat, dan paling sulit dikontrol secara hukum. Ada yang menggambarkan diskresi seperti orang yang sedang berjalan di lereng yang licin, mudah tergelincir.¹⁰

7 Lihat, *The Guide to American Law*, 11, hlm, 420 – 421.

8 Lihat, John Keane, *The Life and Death of Democracy*, hlm. XII.

9 Peter H. Schuck, *Foundation of Administrative Law*.

10 Lihat, Bagir Manan, "Kedudukan Dan Tempat Diskresi

Selain kendali hukum di atas (mudah ditembus), yang tidak kurang penting adalah kendali etik. Unsur-unsur etik jabatan publik sangat penting untuk menjaga diskresi tetap dalam fungsi yang benar (infra).

Keempat, sarana kendali *privilege* dan prerogatif. Dalam catatan ini, *privilege* dibatasi pada hak yang melekat dalam lingkungan badan perwakilan rakyat. Prerogatif adalah hak yang melekat pada presiden (kepala negara).

1. *Privilege* dalam lingkungan badan perwakilan rakyat dibedakan antara hak imunitas anggota badan perwakilan rakyat, dan hak badan perwakilan rakyat mengurus segala kepentingan rumah tangganya. Hak imunitas lazimnya diartikan sebagai bebas dari tanggung jawab hukum atas pernyataan yang diucapkan dalam rapat-rapat badan perwakilan rakyat. Bahkan, di Indonesia, hak imunitas melekat juga atas pernyataan di luar sidang badan perwakilan rakyat sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai anggota badan perwakilan rakyat. Hal semacam ini tidak terdapat di negara lain.

Di suatu negara, seorang anggota badan perwakilan rakyat mengucapkan kata-kata yang menista orang lain. Pengadilan menolak gugatan dengan alasan walaupun benar ucapan itu mengandung penistaan, tetapi karena diucapkan dalam sidang, berlaku hak imunitas. Walaupun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tetapi ucapan itu melanggar etik dan yang bersangkutan mendapat sanksi dari badan etik badan perwakilan yang bersangkutan yang mengakibatkan menurunnya reputasinya sebagai anggota badan perwakilan.

2. Hak prerogatif

Negara-negara republik konstitusional yang mempunyai UUD tidak mengenal sebutan hak prerogatif, melainkan kekuasaan atas dasar konstitusi (*constitutional power*). Walaupun demikian, pada negara republik-konstitusional mengenal juga kekuatan semacam hak prerogatif sehingga acap kali kita mendengar sebutan "hak prerogatif Presiden". Bahasa "awam" ini merupakan

peninggalan budaya ketata- negaraan kolonial yang memang mengenal hak prerogatif mahkota. Dalam catatan ini, tetap dipergunakan sebutan hak prerogatif, sekadar untuk menggambarkan kekuasaan tertentu yang oleh UUD dilekatkan pada kepala negara yang pelaksanaannya tidak tunduk pada hukum c.q. tidak dapat menjadi objek peradilan.

Sebutan prerogatif sangat melekat dengan sistem ketatanegaraan Inggris. Karena itu—sekedar memudahkan—kita catat rumusan hak prerogative, antara lain seperti ditulis Dicey: "*The prerogative ... nothing else than the residue of discretionary or arbitrary authority, which at any given time is legally left in the hands of the Crown*".¹¹ (Prerogatif ... tidak lain dari residu kekuasaan atas dasar diskresi atau kekuasaan arbitrer, yang secara hukum selalu melekat pada mahkota).

Selain hanya ada pada mahkota (atau presiden), ada beberapa unsur lain hak prerogatif.

Kelima, keterbatasan hukum. Tidak segala persoalan dapat diselesaikan secara wajar dan/atau adil melalui hukum, baik karena hukum terlalu keras (*hard law*) maupun karena hukum terlalu lunak (*weak law*). Aturan etik dapat memberikan jalan penyelesaian yang wajar dan/atau adil.

Di bawah ini, dikutip beberapa pandangan mengenai peran etik atau moral dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

(1)Plato:

Seperti dicatat Johanna Oskala dari Universitas Helsinki,¹² Plato menulis:

"The life of rulers, or guardians ... is not the life of luxury and privilege. Unlike workers, guardians are not allowed to own property and they are forced to go to extremes. To avoid the temptations of personal wealth".

(Kehidupan para penguasa/pejabat publik bukanlah suatu kehidupan dalam kemewahan dan dilekati hak-hak istimewa. Tidak seperti para pekerja, para penguasa/pejabat publik tidak boleh mempunyai harta pribadi dan mereka dipaksa

11 A.V. Dicey, *An Introduction to Law of The Constitution*, hlm 424.

12 Johanna Oskala, *Political Philosophy*, 2013, hlm. 13-14.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", Makalah, 2010.

untuk berada dalam keadaan ekstrem tersebut untuk menghindari godaan-godaan kehidupan kaya raya).

Tentu saja, sesuai dengan perkembangan teori-teori yang lebih baru, tidak lagi dapat diterima ajaran yang melarang pejabat memiliki harta pribadi. Tetapi yang perlu diteladani dari ajaran Plato adalah **sudah semestinya pejabat publik menjauhkan diri dari kemewahan- kemewahan dan berbagai keistimewaan**. Inti ajaran Plato adalah para pejabat publik harus menjaga dan hidup dalam kesederhanaan, tidak bermewah-mewah mengumpulkan dan memamerkan kekayaan yang berlebihan. Apalagi, masih begitu banyak masyarakat kita yang hidup dalam serba kekurangan (miskin).

Di bagian lain, Plato mengatakan, puncak perbedaan antara pejabat publik dengan masyarakat: *"not their superior intellect, but superior moral understanding"*.¹³ (Bukanlah keunggulan intelektual yang membedakan antara pejabat dan masyarakat, melainkan keunggulan pemahaman atas moral).

(2) Rousseau

Seperti juga dicatat Johanna Oskala, Rosseau menyatakan:

"Politics is not a realm in which everyone tries to advance his or her own preferences and interests. It is not about asking what is good for me. I must ask what is good for us. Rousseau believes that a contentious understanding of politics can be overcome by focusing political decision - making and debate on the idea of justice and the common good".¹⁴

(Politik bukanlah wilayah tempat setiap orang mencoba untuk mengedepankan preferensi dan kepentingan atau interes pribadi. Politik bukanlah tempat mempersoalkan hal yang baik untuk saya. Politik adalah tempat mempersoalkan apa yang baik untuk kita. Selanjutnya, Oskala mencatat pendapat Rousseau yang menyatakan perdebatan (perbedaan) politik dapat diatasi apabila semua keputusan dan perbedaan politik dipusatkan pada cita-cita keadilan dan kebaikanbersama.

¹³ Ibid, hlm 14.

¹⁴ Ibid, hlm 63.

(3) Immanuel Kant.

"If actions are to be morally good, they must be done for the sake of duty, and only the priori or pure part of ethics can show us what the nature of duty is. By mixing up the different parts of ethics we may easily begin to confuse duty with self interest, and this is bound to have disastrous effects in practice".¹⁵

(Agar perbuatan-perbuatan secara moral (menjadi sesuatu yang baik, haruslah (perbuatan-perbuatan itu), dilakukan semata-mata sebagai suatu tugas (kewajiban) dan hanyalah etik yang akan menunjukkan kepada kita hakikat tugas (kewajiban) itu. Dengan mencampur aduk bermacam-macam bagian dan etik, kita akan mudah bingung atau keliru membedakan antara tugas (kewajiban) dan kepentingan pribadi (*self interest*), dan hal ini akan menimbulkan akibat buruk dalam praktik).

Sesuai dengan pembatasan uraian (hanya mengenai pejabat publik) dari catatan di atas, ada sejumlah prinsip etik yang harus selalu diperhatikan pejabat publik, yaitu

1. Tidak mementingkan diri sendiri (*selflessness*);
2. Integritas (*integrity*);
3. Objektif (*objectivity*);
4. Bertanggung jawab (*responsibility*);
5. Terbuka (*openness*);
6. Kejujuran (*honesty*);
7. Kepemimpinan (*leadership*);
8. Keluhuran budi (*dignity*);
9. Terpercaya (*truthfulness*);
10. Taat pada hukum (*follow the rules*);
11. Berusaha menghasilkan yang terbaik (*produce the best outcome*);
12. Senantiasa berbuat atas dasar dan untuk kebajikan (*act in a way that displays virtue*).

¹⁵ Immanuel Kant, *The Moral Law, Groundwork of the Metaphysic of Moral*, translated by H.S. Paton, 1948.

TEORI DIFERENSIASI ALA PAK KADIR

Oleh: Sunarto (Aceel Sebastian)



***Kalau hidup sekedar hidup,
kera di rimba juga hidup. Kalau
kerja hanya sekedar kerja,
kerbau di sawah juga kerja.
(Buya Hamka)***

//Selamat pagi, Pak. Diantar ke Soekarno-Hatta ya, Pak? Sudah semua, Pak?

Tidak ada yang ketinggalan?" sapa sang pengemudi taksi dengan ramah menyambut saya memasuki mobilnya. Saya *surprise* karena taksi tersebut sudah *standby* di depan rumah pukul 03.30 pagi, 15 menit lebih awal dari jadwal.

Pengemudi tersebut mengenalkan diri, namanya Pak Kadir. Dari logatnya, dengan mudah dapat ditebak, pasti *wong Jowo*. Pak Kadir bercerita sudah bekerja di perusahaan taksi berwarna biru tersebut selama lebih dari 24 tahun. Di *pool*-nya, dia yang paling senior. "Maaf Pak, kita lewat mana? AC-nya sudah cukup atau terlalu dingin?" tanyanya lagi. "Kita lewat pintu tol Ciledug ya, Pak," jawab saya. Perjalanan pagi-pagi ke *airport* sudah jadi salah satu rutinitas yang saya jalani beberapa tahun terakhir. Kali ini, saya kesengsem dengan sikap Pak Kadir dan memutuskan untuk mengobrol meskipun

sebenarnya masih sangat mengantuk.

"Saya seminggu *narik* lima hari, Pak. Setiap hari berangkat jam 3 dini hari dan biasanya pulang ke *pool* siang jam 12-an. *Alhamdulillah* selalu tercapai target harian untuk dapat bonus. Pokoknya, saya harus dapat 2 rit ke *airport* antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Itu kuncinya, Pak. Kalau dapat dua rit ke *airport*, itu sudah dapat 60% target. Sisanya kita kejar sampai jam 12 siang. Setelah dari *airport*, saya biasanya jalan di dalam kota. *Nah*, baru menjelang *dhuhur*, saya mengarah ke daerah pinggiran dan pulang," cerita pak Kadir tentang "resep"-nya dalam memburu rezeki.

"Wah, jam 12 sudah pulang ke *pool*. Enak banget, Pak. Bapak sepertinya *nggak ngoyo* (ngotot) ya? Padahal siang hari seperti itu mestinya lagi ramai-ramainya penumpang ya, Pak?" saya menimpali ceritanya dengan logika saya. Badan saya yang *capek* membuat cerita pak Kadir seperti "dongeng" menjelang



tidur.

"Menurut Bapak, saya *nggak ngoyo* ya, Pak?" tanyanya dengan nada meyakinkan. "Saya bangun jam 2 setiap hari dan mulai kerja jam 3 dini hari itu apakah tidak "*ngoyo*" Pak? Saya memulai kerja sepagi itu karena mencari



peluang yang lebih besar. Banyak sopir yang bekerja hampir 12 jam per hari tidak mencapai target. Saya bekerja sekitar 8 jam dan alhamdulillah selalu dapat target. Kuncinya pak, dalam bekerja kita harus pintar mengatur strategi. Kerja tidak asal mengalir tetapi harus direncanakan dan diatur agar hasilnya maksimal."

"Saya berangkat pagi-pagi saat banyak orang belum bangun dari tidurnya. Saya harus mendahului mereka agar saya dapat *order* duluan. Saya pakai waktu terbaik (*prime time*) 3 jam di pagi hari itu karena jalanan masih lancar, *order*-nya jauh-jauh (ke *airport* maksudnya) dan taksi *online* belum begitu banyak."

"Pokoknya pak, kita kalo kerja, *nggak* boleh seperti orang kebanyakan. Kita harus beda sehingga rezeki kita juga beda. Dan itu bisa saya lakukan karena saya sudah 24 tahun di "jalanan" jadi paham *bener* situasinya. Sore-sorean saya sudah kumpul keluarga,

main sama cucu. Hidup itu harus imbang Pak antara waktu kerja, keluarga, dan istirahat. *Alhamdulillah*, saya sudah ada rumah sendiri, anak saya dua, sudah kerja dan menikah. Cucu saya juga dua orang," jelas pria bersahaja ini. *Dahsyat*, batin saya mendengar cerita pak Kadir yang hebat tersebut.

Teori diferensiasi (*differentiation theory*) yang pernah dipopulerkan Prof. Phillip Kotler, sang begawan marketing, sepertinya sudah benar-benar dijiwai oleh Pak Kadir. Dia mencari 'strategi pembeda' dengan yang lain agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam bahasa Pak Kadir, untuk hidup, bekerja, dan berhasil tidak bisa mengalir begitu saja. Dalam bekerja tidak asal bekerja. Bekerja harus dijiwai (ada *passion*) dan dijalankan dengan strategi yang jelas dan terukur. Strategi itu diperoleh dari pemahaman yang cukup terhadap target yang hendak dicapai, mempertimbangkan faktor eksternal yang relevan terutama kompetisi, serta menggunakan pengetahuan dan pengalaman (data historis) sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam ilmu manajemen lebih kurang semacam *SWOT analysis*.

Dalam konteks tersebut, Pak Kadir mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini harus diperjuangkan dan dimaknai. Meraih keberhasilan itu tidak mudah, perlu kerja keras dan strategi untuk mencapainya. Allah SWT telah memberikan kepada kita akal untuk menjalankan *sunnatullah* di dunia ini. Dengan akal itulah, kita mengatur strategi bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Mengutip *quote* Buya Hamka di atas, dengan berbekal akal-lah kita harus mampu membedakan kualitas kehidupan dan kerja kita dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Maka, untuk memperoleh hasil yang terbaik, sudah sewajarnya kita bisa bekerja dengan cerdas (*smart*) dengan memaksimalkan akal dan pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita. Semoga bermanfaat. (*)



Saya Anak Antikorupsi (SAAK)



**"Menciptakan Generasi Muda
Cerdas, Berintegritas,
dan Berkarakter"**



1. Memperkuat ketakwaan generasi muda terhadap Tuhan YME serta kecintaan terhadap tanah air;
2. Menanamkan nilai antikorupsi kepada generasi muda (kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerja sama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian);
3. Menumbuhkembangkan kebiasaan baik sebagai bentuk pendidikan karakter.

